

EKONOMI KERAKYATAN

Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa

Tim Penulis:

Putri Zafira Ruhliandini | Asep Dadang Hidayat
Akhdad Solikin | Nida Nurlivi Fauziyah
Mochamad Heru Riza Chakim | Riski Aprilianti Baharuddin
Norbertus Citra Irawan | Amanna Dzikrillah Lazuardini
Septantri Shinta Wulandari | Nurlaila Hanum
Hardjanto Nusantoro | Siti Masrurroh | Pathmi Noerhatini
Risa Lailatul Majidah | Jajuli | Umunnisa Hidayati | Erni Junaida



EKONOMI KERAKYATAN

Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa

**Putri Zafira Ruhliandini
Asep Dadang Hidayat
Akhmad Solikin
Nida Nurlivi Fauziah
Mochamad Heru Riza Chakim
Riski Aprilianti Baharuddin
Norbertus Citra Irawan
Amanna Dzikrillah Lazuardini
Septantri Shinta Wulandari
Nurlaila Hanum
Hardjanto Nusantoro
Siti Masruroh
Pathmi Noerhatini
Risa Lailatul Majidah
Jajuli
Umunnisia Hidayati
Erni Junaida**

EKONOMI KERAKYATAN

Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa

Tim Penulis:

Putri Zafira Ruhliandini
Asep Dadang Hidayat
Akhmad Solikin
Nida Nurlivi Fauziyah
Mochamad Heru Riza Chakim
Riski Aprilianti Baharuddin
Norbertus Citra Irawan
Amanna Dzikrillah Lazuardini
Septantri Shinta Wulandari
Nurlaila Hanum
Hardjanto Nusantoro
Siti Masruroh
Pathmi Noerhatini
Risa Lailatul Majidah
Jajuli
Umunnisia Hidayati
Erni Junaida

Editor : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.
Tata Letak : Asep Nugraha, S.Hum.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : x, 293
ISBN : 978-634-7021-57-1
Terbit Pada : Juli 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selukur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku "**Ekonomi Kerakyatan: Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa**" ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang mencoba mengelaborasi dan menegaskan kembali betapa vitalnya konsep ekonomi kerakyatan dalam membangun fondasi keadilan sosial dan kemandirian bangsa di Indonesia.

Dalam dinamika perekonomian global yang kian kompleks, seringkali kita terjebak dalam arus liberalisasi dan kapitalisme yang cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat akar rumput. Di tengah tantangan tersebut, gagasan ekonomi kerakyatan muncul sebagai mercusuar harapan, menawarkan paradigma yang berpusat pada pemberdayaan rakyat, pemerataan aset, serta keadilan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan. Ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah jalan nyata menuju kemakmuran yang merata dan berkelanjutan.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengurai benang kusut pemahaman tentang ekonomi kerakyatan, mulai dari landasan filosofis, prinsip-prinsip dasar, hingga implementasi praktisnya. Kami mencoba menyajikan perspektif yang komprehensif, mencakup peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, serta pentingnya kebijakan afirmatif yang berpihak pada rakyat kecil. Lebih dari itu, kami ingin menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan bukanlah sistem yang terisolasi, melainkan sebuah ekosistem yang mampu bersinergi dengan berbagai elemen perekonomian untuk mencapai tujuan nasional.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi para akademisi, mahasiswa, praktisi ekonomi, pembuat kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Semoga buku ini dapat memicu diskusi yang lebih mendalam, mendorong inovasi, serta menginspirasi langkah-langkah konkret dalam mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan pembaca sekalian.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 FILOSOFI EKONOMI KERAKYATAN	1
Pendahuluan.....	2
Hakikat dan Landasan Ekonomi Kerakyatan	3
Peran Strategis Sumber Daya Manusia dalam Ekonomi Kerakyatan	6
Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Manajemen SDM Organisasi	8
Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Lain	11
Daftar Pustaka	13
Profil Penulis	14
BAB 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA	15
Pendahuluan.....	16
Konsep Dasar dan Akar Pemikiran Ekonomi Kerakyatan	16
Periode Pra Kemerdekaan: Era Pergerakan Nasional (Awal Abad ke-20 hingga 1945)	18
Periode Order Lama: Mandiri dan Berdikari	19
Periode Order Baru: Pembangunan dan Kesejahteraan Semu?.....	21
Periode Reformasi: Kebangkitan dan Tantangan Baru.....	23
Karakteristik Pemikiran Ekonomi Kerakyatan di Indonesia.....	25
Kesimpulan.....	26
Daftar Pustaka	27
Profil Penulis	29
BAB 3 EKONOMI KERAKYATAN DALAM KONSTITUSI.....	30
Pendahuluan.....	31
Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945	32
Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Pasar Sosial	35
Koperasi, UMKM dan BUMDesa Dalam Ekonomi Kerakyatan ...	37

Simpulan.....	40
Daftar Pustaka	41
Profil Penulis	43
BAB 4 PERBANDINGAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN KAPITALISME DAN SOSIALISME	44
Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan, Kapitalisme, dan Sosialisme	45
Peran Negara dalam Setiap Sistem Ekonomi	48
Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi.....	52
Kelebihan dan Kekurangan dalam Mencapai Kesejahteraan Rakyat.....	55
Implikasi Globalisasi terhadap Ekonomi Kerakyatan, Kapitalisme, dan Sosialisme.....	59
Daftar Pustaka	63
Profil Penulis	65
BAB 5 KOPERASI SEBAGAI SOKOGURU EKONOMI KERAKYATAN	66
Pendahuluan.....	67
Pengertian Koperasi	68
Peran Strategis Koperasi dalam Ekonomi Kerakyatan	69
Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi Nasional	70
Tantangan dan Permasalahan Yang Dihadapi Koperasi.....	72
Strategi Revitalisasi dan Transformasi Koperasi.....	74
Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Penguatan Koperasi.....	76
Simpulan.....	78
Daftar Pustaka	80
Profil Penulis	82
BAB 6 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM).....	83
Peran Strategis UMKM dalam Ekonomi Kerakyatan	84
Karakteristik dan Klasifikasi UMKM di Indonesia.....	85
Tantangan dan Peluang Pengembangan UMKM.....	87
Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mendukung UMKM	90
Daftar Pustaka	94
Profil Penulis	95

BAB 7 PERTANIAN RAKYAT DAN KEDAULATAN PANGAN	96
Potret Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan.....	97
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani Menuju Kedaulatan Pangan.....	100
Ekonomi Kerakyatan dan Arah Kebijakan Kedaulatan Pangan	103
Studi Kasus Impor dan Kedaulatan Pangan	105
Daftar Pustaka	109
Profil Penulis	112
BAB 8 EKONOMI KREATIF DAN POTENSI LOKAL.....	113
Ekonomi Kreatif.....	114
Peran Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Nasional	114
Potensi Lokal	115
Identifikasi dan Pemetaan Potensi Lokal.....	116
Kearifan Lokal sebagai Sumber Inovasi	117
Tantangan dalam Pemanfaatan Potensi Lokal	117
Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	118
Model-model Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	119
Teknologi Digital dalam Penguatan Ekonomi Kreatif.....	121
Roadmap Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	122
Kesimpulan.....	123
Daftar Pustaka	125
Profil Penulis	127
BAB 9 AKSES PERMODALAN DAN KEUANGAN INKLUSIF	128
Pendahuluan.....	129
Konsep Akses Permodalan	130
Konsep Keuangan Inklusif	133
Kondisi Terkini Akses Permodalan di Indonesia	136
Peran Lembaga Keuangan dalam Mendorong Inklusi.....	138
Tantangan dan Peluang ke Depan.....	141
Penutup.....	144
Daftar Pustaka	147
Profil Penulis	148

BAB 10 PAJAK PROGRESIF DAN KEADILAN DISTRIBUSI.....	149
Pendahuluan.....	150
Konsep Dasar Pajak Progresif	151
Teori Keadilan Distribusi.....	152
Hubungan antara Pajak Progresif dan Keadilan Distribusi.....	154
Tantangan dan Kritik terhadap Pajak Progresif.....	156
Studi Kasus: Implementasi Pajak Progresif dan Dampaknya terhadap Keadilan Distribusi.....	158
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	160
Daftar Pustaka	162
Profil Penulis	163
BAB 11 EKONOMI HIJAU DAN ENERGI TERBARUKAN	164
Pendahuluan.....	165
Prinsip Dasar Ekonomi Hijau	165
Hubungan Ekonomi Hijau dengan Ekonomi Kerakyatan.....	166
Potensi Energi Terbarukan di Indonesia	167
Potensi Energi Surya di Indonesia	168
Potensi Energi Air Terbarukan di Indonesia.....	169
Potensi Energi Angin Terbarukan di Indonesia.....	171
Potensi Energi Terbarukan dari Biomasa	172
Potensi Energi Panas Bumi (Geothermal)	173
Kolaborasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat menuju Ekonomi Hijau	175
Studi Kasus: Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia	175
Strategi Mendorong Ekonomi Hijau di Tingkat Nasional.....	176
Jalan Menuju Keadilan Ekologis dan Kemandirian Energi	177
Daftar Pustaka	178
Profil Penulis	179
BAB 12 PENGEMBANGAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN....	180
Pendahuluan.....	181
Konsep Ekonomi Pesantren	181
Landasan Filosofis dan Teologis	183
Model-model Ekonomi di Pesantren.....	184
Peran Santri dan Alumni.....	187
Tantangan dan Peluang.....	188
Daftar Pustaka	192

Profil Penulis	195
BAB 13 PEMASARAN PRODUK LOKAL DALAM GERAKAN SLOW FOOD.....	196
Pendahuluan.....	197
Konsep <i>Slow food</i> dan Tantangan Produk Lokal	198
Strategi Pemasaran Produk Lokal Dalam Gerakan <i>Slow food</i>	200
Dampak Ekonomi dan Sosial	211
Kesimpulan.....	212
Daftar Pustaka	213
Profil Penulis	226
BAB 14 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM EKONOMI KERAKYATAN.....	227
Perempuan dan Ekonomi Kerakyatan	228
Peran Strategis Perempuan dalam Ekonomi Rakyat.....	232
Tantangan yang dihadapi Perempuan	235
Harapan untuk Masa Depan Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan	239
Daftar Pustaka	241
Profil Penulis	246
BAB 15 PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	247
Pendahuluan.....	248
Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Perlindungan Sosial	249
Landasan Hukum Perlindungan dan Jaminan Sosial di Indonesia.....	251
Program-program Utama Perlindungan dan Jaminan Sosial di Indonesia.....	253
Tantangan dalam Implementasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	256
Arah Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial di Masa Depan	258
Kesimpulan.....	260
Daftar Pustaka	261
Profil Penulis	263
BAB 16 KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DALAM KONTEKS EKONOMI KERAKYATAN.....	264
Pendahuluan.....	265

Potret Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia	266
Ekonomi Kerakyatan sebagai Alternatif Strategis.....	272
Strategi Pengentasan Kemiskinan dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan	273
Penutup.....	277
Daftar Pustaka	278
Profil Penulis	282
BAB 17 GENERASI MUDA DAN REGENERASI EKONOMI KERAKYATAN.....	283
Pengertian Generasi Muda.....	284
Peran Strategis Generasi Muda.....	284
Regenerasi Ekonomi Kerakyatan.....	286
Tantangan Regenerasi Ekonomi Kerakyatan.....	289
Solusi Kunci Permasalahan Ekonomi Kerakyatan.....	290
Daftar Pustaka	292
Profil Penulis	293



BAB 1

FILOSOFI EKONOMI

KERAKYATAN

Putri Zafira Ruhliandini, M.E.
Universitas Ma'soem



Hakikat dan Landasan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai subjek dan tujuan utama pembangunan ekonomi. Ini berarti kegiatan ekonomi didasarkan pada partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata. Sistem ini sering disebut juga sebagai ekonomi Pancasila di Indonesia, karena prinsip-prinsipnya sejalan dengan nilai-nilai luhur Pancasila.

1. Konsep Inti Ekonomi Kerakyatan

Konsep inti ekonomi kerakyatan berakar pada beberapa prinsip fundamental, yang membedakannya dari sistem ekonomi lain seperti kapitalisme.

a. Kedaulatan Rakyat

Dalam ekonomi kerakyatan, keputusan ekonomi yang penting diambil berdasarkan kepentingan rakyat banyak, bukan hanya segelintir kelompok atau pemilik modal besar. Rakyat memiliki kendali atas kegiatan ekonomi mereka, dan pemerintah bertindak sebagai fasilitator yang menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha rakyat.

b. Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kemandirian

Ekonomi kerakyatan mendorong pengelolaan sumber daya ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasai secara swadaya oleh rakyat. Ini termasuk pemanfaatan sumber daya lokal untuk mencukupi kebutuhan dasar keluarga dan masyarakat sekitar. Tujuannya adalah memperkuat kemandirian ekonomi bangsa dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing atau produk impor.

c. Asas Kekeluargaan dan Gotong Royong

Sistem ekonomi ini dibangun di atas asas kekeluargaan dan semangat gotong royong. Kerja sama dan kolaborasi antar pelaku ekonomi rakyat sangat ditekankan, misalnya melalui koperasi, yang menjadi wadah untuk menghimpun para pelaku ekonomi rakyat dan meningkatkan posisi tawar mereka.

d. Pemerataan dan Keadilan Sosial

Salah satu tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah meratanya

partisipasi kolektif dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil serta menengah. Sistem ini berusaha menghindari eksploitasi ekonomi oleh kelompok modal besar dengan menekankan asas kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi.

2. Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kapitalis

Ekonomi yang berprinsip sosialisme mengedepankan peran negara sebagai pengendali utama sumber daya ekonomi. Tujuan dari prinsip ini adalah menciptakan keadilan sosial melalui distribusi yang terpusat. Meskipun memiliki kesamaan dengan ekonomi kerakyatan dalam hal keadilan ekonomi, ekonomi sosialisme sering mengorbankan kebebasan individu dalam berusaha. Di sisi lain, ekonomi kerakyatan berbeda dengan sosialisme dalam kebebasan masing-masing individu. Ekonomi kerakyatan mengakui peran pasar dan inisiatif individu. Persaingan yang sehat dapat terus berjalan tanpa tekanan yang terlalu memaksa. Penetapan kebijakan pada ekonomi kerakyatan sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat banyak (Nurhayati dkk., 2025).

Daftar Pustaka

- Dr. Jiuhardi, S. E. , M. M. (2022). *EKONOMI PANCASILA DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRIALISASI* (Muh. S. Muttaqin, Ed.; 1 ed.).Cipta Media Nusantara (CMN).
- Nurhayati, Pujiriyani, D. W., Sakti, R. A., Bawazeer, M., Kurniawan, A., Halim, B., Minarsi, A., & Lestari, E. K. (2025). *Ekonomi Kerakyatan (Membangun Kemandirian Nasional)* (1 ed.). PT. Star Digitaling Publishing.
- Surip, N., Syarbaini, S., & Rahman. (2015). *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi.

PROFIL PENULIS



Putri Zafira Ruhliandini, M.E.

Ketertarikan penulis pada perpaduan antara prinsip keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan semangat gotong royong telah membawanya untuk mendalami berbagai aspek sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Melalui buku "EKONOMI KERAKYATAN: Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa" Penulis berbagi wawasan filosofis, studi strategi implementatif yang relevan bagi para calon penggerak ekonomi kerakyatan, pelaku UMKM, koperasi, pembuat kebijakan, serta siapa saja yang tertarik untuk memahami seluk-beluk peluang dan tantangan dalam membangun dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan gaya penulisan yang lugas dan mudah dipahami, inspiratif dan memotivasi, penulis mengajak pembaca untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat secara efektif dalam perjalanan mencapai kemandirian dan kemakmuran bersama.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi dan Manajemen. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: pz0107@gmail.com



BAB 2
SEJARAH PEMIKIRAN
EKONOMI KERAKYATAN
DI INDONESIA

Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Agama Islam Daarut Tauhiid



Pendahuluan

Pemikiran ekonomi kerakyatan adalah suatu bentuk pandangan ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi dengan menekankan pada prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat bawah. Paradigma ini lahir dari kesadaran historis bangsa Indonesia atas pengalaman penjajahan ekonomi oleh kolonialisme, serta sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang muncul dalam sistem ekonomi kapitalisme (Nurhayati et al., 2025).

Memahami sejarah pemikiran ekonomi kerakyatan, sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan. Pemahaman tersebut menjadi modal utama untuk merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Nurhayati et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, ekonomi kerakyatan mendapat fondasi konstitusional yang kuat melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) berbunyi: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak menganut liberalisme pasar bebas, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kesejahteraan bersama (Firmansyah, 2012).

Konsep Dasar dan Akar Pemikiran Ekonomi Kerakyatan

Konsep Ekonomi kerakyatan lahir dari kesadaran bahwa sistem ekonomi yang terlalu liberal sering kali menciptakan ketimpangan sosial dan dominasi segelintir elite atas sumber daya ekonomi. Akar pemikiran ekonomi kerakyatan bisa dilacak sejak masa sebelum kemerdekaan, ketika tokoh-tokoh nasionalis mulai menggagas bentuk-bentuk ekonomi yang memihak kepada rakyat (Tjakrawerdaja et al., 2017).

1. Akar Budaya dan Tradisi Lokal

Dalam masyarakat adat, prinsip keadilan sosial, gotong royong, dan musyawarah telah menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Tradisi lumbung desa, arisan, koperasi simpan pinjam adat, dan sistem bagi hasil dalam pertanian mencerminkan semangat kemandirian ekonomi masyarakat lokal (Duana et al., 2023).

Kesimpulan

Pemikiran ekonomi kerakyatan di Indonesia dimulai dari masa pergerakan nasional, era kemerdekaan, Orde Baru, hingga masa Reformasi. Pada masa awal, gagasan ini muncul sebagai reaksi atas ketimpangan dan penindasan ekonomi kolonial, lalu diperkuat oleh tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta yang menekankan koperasi dan demokrasi. Setiap kali terjadi krisis atau ketimpangan, pemikiran ini selalu kembali diangkat sebagai alternatif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan fundamental untuk Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dengan terus menanamkan nilai gotong royong, keadilan sosial, dan keberpihakan pada rakyat kecil, ekonomi kerakyatan akan tetap menjadi jalan menuju kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Duana, R., Herlina, N., Perdana, M. P., Effendy, M. A., & Supriyatin, U. (2023). FUNGSI DAN PERAN HUKUM ADAT DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN NEGARA. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 261–269.
- Firmansyah, A. (2012). Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 51–65.
- Harefa, D., & Fatosola Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.
- Hidayat, A. (2022). KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965). *Alur Sejarah: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1).
- Hosein, Z. A. (2016). Peran negara dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(3), 503–528.
- Ilhami, M. R., Rahmia, S. H., Rusmaniah, R., Syarifuddin, S., Abbas, E. W., Mutiani, M., & Triyono, S. (n.d.). *Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa*. CV. Jendela Hasanah.
- Meliala, A. J., & SH, M. H. (2023). *Melawan Dinamika Kapitalisme Dengan Hukum Ekonomi Kerakyatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Nurhayati, N., Pujiriyani, D. W., Sakti, R. A., Bawazeer, M., Kurniawan, A., Halim, B., Minarsi, A., Lestari, E. K., Muta'ali, L., & Juansa, A. (2025). *Ekonomi Kerakyatan: Membangun Kemandirian Nasional*. Henry Bennett Nelson.
- Putra, N. P. (2024). *Memahami Inti Masalah Ekonomi-Penyebab Masalah Yang Terjadi Saat Ini: Rahasia Di Balik Krisis Ekonomi Yang Jarang Terungkap*. Putra Perdana.
- Rudiansyah, R. (2021). *Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. IAIN Parepare.
- Soegiastuti, J. (2012). Penerapan Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Memperkuat Usaha Mikro, Kecil Dan

Menengah (UMKM). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 25073.

Tirtosudarmo, R. (2022). *Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial (BW)*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Tjakrawerdaja, S., Soedarno, S., Lenggono, P. S., Purwandaya, B., Karim, M., & Agusalim, L. (2017). *Sistem Ekonomi Pancasila*. Rajawali Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *PEMBANGUNAN EKONOMI, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.

Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2020). Peran Negara Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 36-51.

PROFIL PENULIS



Asep Dadang Hidayat, S.H., M.H.

Lulus dari SMAN 1 Baleendah Bandung pada tahun 1987 dengan jurusan FISIKA. Penulis melanjutkan Pendidikan jenjang S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES), dan alhamdulillah menyelesaikan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan jurusan yang sama Hukum Ekonomi Syari'ah (HES). Sambil hikmat mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam

Daarut Tauhiid Bandung, penulis masih tercatat menjadi mahasiswa S3 Prodi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis pertama kali bekerja di kantor Akuntan Publik Hertanto & Co Jakarta, dan ditugaskan di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), kemudian pindah ke perusahaan Industri Textil (Divisi Logistik dan Sistem Informasi) di Bandung, bertahan selama 20 tahun di Industri Textil, kemudian penulis memutuskan untuk keluar dan mulai berwiraswasta. Satu cita-cita penulis, yaitu bisa berdakwah melalui tulisan, harapan penulis dapat meninggalkan tulisan-tulisan baik berupa buku, jurnal maupun naskah-naskah di media yang dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyak umat. Aamiin.

Email Penulis: adhidayat.staidt@gmail.com



BAB 3

EKONOMI

KERAKYATAN DALAM

KONSTITUSI

Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D.
Politeknik Keuangan Negara STAN



Pendahuluan

Konstitusi atau undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia saat bab ini ditulis (yaitu tahun 2025) adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi Indonesia yang berlaku sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu:

1. UUD 1945 yang berlaku periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949,
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yang berlaku 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950,
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, berlaku 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959,
4. UUD 1945 yang berlaku kembali mulai 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.

UUD 1945 yang berlaku kembali setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut sampai saat ini (2025) telah mengalami empat kali perubahan (amandemen), yaitu diubah dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Bab dan pasal yang diamandemen beraneka ragam. Khusus yang berkaitan dengan topik bab ini, yaitu ekonomi kerakyatan, bab yang terkait yaitu Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 33 dan Pasal 34. Pasal 33 sebelum amandemen terdiri dari tiga ayat, yang kemudian pada perubahan (amandemen) keempat tahun 2002 ditambahkan dua ayat, sehingga menjadi lima ayat. Kutipan lengkap dari ayat-ayat pada Pasal 33 tersebut adalah sebagai berikut:

“Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.”



Gambar 3.1: Wapres Bung Hatta Mengunjungi Koperasi Rotan di Cirebon, Tembaga di Majalengka dan Batik di Pekalongan (1956)

Sumber: ANRI (2005, 2006)

Menurut Hatta (2018) koperasi didambakan sebagai soko guru ekonomi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 karena mengingat pengalaman sejarah bangsa Indonesia ketika penjajahan Belanda dimana perekonomian dibagi dalam tiga tingkat. Tingkat usaha besar dalam produksi, perkebunan, industri, transportasi dan keuangan dikuasai oleh kelompok Belanda/Eropa. Kelompok menengah dikuasai oleh Tionghoa dan golongan Asia lainnya, sedangkan produksi skala kecil dan pegawai kecil diisi oleh pribumi dengan jumlah orang yang sangat banyak. Kelompok produksi yang kecil itu bisa saling menolong (*self-help*) berdasarkan persaudaraan dengan membentuk koperasi sebagai usaha bersama. Koperasi tersebut dipergunakan sebagai alat untuk naik kelas dari usaha kecil, kemudian berangsur-angsur menjadi usaha menengah, dan usaha besar, sebagaimana dilihat oleh para pendiri bangsa di negara-negara Eropa pada waktu itu.

Masih menurut Hatta (2018), koperasi awalnya berperan di usaha kecil. Negara atau pemerintah berperan menyediakan barang publik yang membutuhkan dana besar, sedangkan swasta nasional masih mempunyai cukup ruang bergerak di antara keduanya. Jika swasta nasional tidak mampu, maka bisa mengundang perusahaan asing, tetapi dengan mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Daftar Pustaka

- ANRI. (2005). *Citra Jawa Tengah Dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- ANRI. (2006). *Citra Jawa Barat Dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Arifin, B., Wicaksono, E., Tenrini, E. H., Wardhana, I. W., Setiawan, H., ..., & Handoko, R. (2020). Village fund, village-owned enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382-394.
- Benecke, D. W. (2008). Social and ecological market economy- A general overview. Dalam Küsel dkk. *The Social and Ecological Market Economy- A Model for Asian Development?* Eschborn: GTZ.
- Hatta, M. (2018). Cita-cita koperasi dalam Pasal 33 UUD 1945. Dalam *Karya Lengkap Bung Hatta Buku 6: Gerakan Koperasi dan Perekonomian Rakyat*. Depok: LP3ES.
- Hoesein, Z. A. (2016). Peran negara dalam pengembangan system ekonomi kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(23), 503-528.
- Kumaratih, C. & Sartono, T. (2020). Cooperative law policy: Historical study of cooperative settings in Indonesia. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(1), 34-44.
- Lemhannas. (2020). *Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD 1945*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional.
- Rachbini, D, J. (2004). *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Salsabil, H. H., Munazih, M. & Kunarti, S. (2025). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 901-922.
- Saputra, D., Putra, D. A., Putri, I. S., Septaria, E. & Adepio, M. I. (2025). Analisis yuridis peristiwa pagar laut ditinjau dari hukum nasional

dan hukum internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 285-191.

Solikin, A., Badriatin, T., San Marino, W., Defitri, S. Y., Sitepu, H. V., ..., Sari, N. P. (2024). *Keuangan Publik*. Bandung: Widina Media Utama.

Sultani, Z. I. M. & Kristanti, Y. P. (2020). Perkembangan dan pelaksanaan pendidikan zaman kolonial Belanda di Indonesia abad 19-20. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91-106.

Utomo, R. G. P. & Heliaantoro, H. (2024). Implementation of Article 33 Paragraph 2 and 3 of the 1945 Constitution in granting concessions for natural resource management to foreign companies from international private law perspective: A case study of PT XYZ. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 2(2), 26-39.

Wardana, A. F. G. (2021). Analisis kesesuaian pengaturan Badan Usaha Milik Desa dengan nilai-nilai Pancasila. *Jurnal Al-Wasath*, 2(2), 63-74.


PROFIL PENULIS



Akhmad Solikin, S.E., M.A., Ph.D., C.A.

Akhmad Solikin aka Akhsol adalah dosen Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN), BPPK, Kementerian Keuangan. Alumni D3 STAN, S1 PE FEUI, S2 Hiroshima University dan S3 Ruhr-University Bochum, Jerman. Pengalaman bekerja di Kementerian Keuangan sebagai staf dan pejabat struktural di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dan PKN STAN. Sebagai dosen di PKN STAN, mengajar matakuliah Keuangan Publik, Perekonomian Indonesia, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro, Ekonomi Mikro dan Pengambilan Keputusan, Ekonomi Makro, Sistem dan Kebijakan Sektor Keuangan, Manajemen, Manajemen Keuangan, dan Etika dan Antikorupsi. Minat penelitian meliputi ekonomi/keuangan publik, ekonomi pembangunan, serta *governance*. Selain itu, minat pengabdian masyarakat antara lain tentang pendampingan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Email Penulis: akhsol@pknstan.ac.id



BAB 4
PERBANDINGAN
EKONOMI KERAKYATAN
DENGAN KAPITALISME
DAN SOSIALISME

Nida Nurlivi Fauziyah, S.Si., M.Han.
Universitas Insan Cita Indonesia



Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan, Kapitalisme, dan Sosialisme

Berdasarkan sumber-sumber yang diberikan, berikut adalah penjelasan mengenai prinsip dasar sistem ekonomi Kerakyatan, Kapitalisme, dan Sosialisme, serta perbedaan mendasar diantara ketiganya:

1. Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi Kerakyatan adalah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi ini berupaya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi agar perekonomian dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Tujuan utama Ekonomi Kerakyatan adalah kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip dasarnya meliputi:

- a. Berasaskan kekeluargaan
- b. Berkedaulatan rakyat
- c. Menunjukkan pemihakan yang sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat
- d. Merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang dapat diusahakan dan dikuasai, sering disebut sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- e. Kegiatan ekonomi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keluarga tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya
- f. Sistem ini sangat berkaitan erat dengan Koperasi, yang memiliki tujuan yang sama dengan ekonomi kerakyatan, yaitu memperbaiki kehidupan ekonomi berdasarkan asas gotong royong dan kekeluargaan, serta menjadi wadah perekonomian rakyat dengan mengutamakan prinsip-prinsip kesejahteraan
- g. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung dan mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat

Penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Ekonomi Kerakyatan diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan keadilan ekonomi.

terhadap dominasi kapitalisme global yang cenderung menciptakan ketidakadilan sosial.

Secara ringkas, globalisasi memperkuat jangkauan dan dampak kapitalisme, menciptakan peluang pertumbuhan namun juga memperdalam ketimpangan. Sementara itu, sosialisme tradisional dan ekonomi kerakyatan menghadapi tekanan untuk beradaptasi, dengan kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada kemampuan internal untuk mempertahankan nilai-nilai inti dan efektivitas kebijakan dukungan dalam negeri untuk melindungi dan memberdayakan mereka dalam lingkungan global yang kompetitif.

Daftar Pustaka

- Adam, M. N. A. S., Hamin, D. I., & Hasim. (2024). Perbandingan sistem ekonomi sosialisme, kapitalisme, dan ekonomi syariah: Sebuah analisis kritis terhadap prinsip, implementasi, dan dampak sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JAMBURA)*, 7(2), 1011–1025. <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/JIMB>
- Amri, H. (2017). Kelemahan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme menurut Muhammad Sharif Chaudhry dalam karyanya *Fundamental of Islamic Economic System*. *Economica Sharia*, 2(2), 1–10.
- Basri, B., Saifuddin, & Busrah. (2021). Ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Polewali). *Journal Pegguruang: Conference Series*, 3(2), 1–10.
- Booth, A. (2016). *Economic change in modern Indonesia: Colonial and post-colonial comparisons*. Cambridge University Press.
- Challoumis, C. (2024). Comparative analysis of economic systems: Capitalism, socialism, and economocracy. SSRN. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4915667
- Duncan, P. J. S., & Schimpfössl, E. (Eds.). (2019). *Socialism, capitalism and alternatives: Area studies and global theories*. UCL Press. <https://doi.org/10.14324/111.9781787353824>
- Economics in Context Initiative. (2021). *Comparative economic systems: Capitalism and socialism in the 21st century*. Global Development Policy Center, Boston University. <http://www.bu.edu/eci>
- Itang, & Daenuri, A. (2017). Sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan Islam. *Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(1), 67–84.
- Kennett, D. A. (2011). *Comparative economic systems: Culture, wealth, and power in the 21st century* (2nd ed.). Pearson Education.

- Khaer, A. (2017). Paradigma holistik ekonomi dalam Islam: Studi perbandingan dengan kapitalisme dan sosialisme. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(2), 101–117. <https://doi.org/10.22373/share.v6i2.1524>
- Mujahidin, A., Saifuddin, & Busrah. (2021). Ekonomi kerakyatan dalam menanggulangi kemiskinan (Studi kasus Koperasi Mitra Dhuafa Kecamatan Polewali). *Journal Peqguruang: Conference Series*, 3(2). <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2223>
- Nata, M. A. D., & Haryono, A. (2022). Implementasi ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi digital untuk membangkitkan UMKM pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*, 10(1), 38–47.
- Rosser, J. B., Jr., & Rosser, M. V. (2004). *Comparative economics in a transforming world economy* (2nd ed.). The MIT Press.
- Satyananda, G. (2010). *Comparative economic systems* [Unpublished lecture manuscript].


PROFIL PENULIS



Nida Nurlivi Fauziyah, S.Si., M.Han.

Seorang dosen tetap pada Program Studi Bisnis Digital, Universitas Insan Cita Indonesia. Lahir pada tahun 1993, beliau menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor (IPB). Minatnya yang kuat di bidang manajerial dan strategis kemudian membawanya melanjutkan studi pascasarjana (S2) di Universitas Pertahanan Indonesia, dengan konsentrasi di Fakultas Manajemen. Saat ini, beliau tengah menempuh pendidikan doktoral (S3) di Sekolah Bisnis – IPB University, sebagai penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Dalam Negeri tahun 2024, batch pertama. Sebagai bagian dari pengembangan kompetensi global, beliau juga telah menyelesaikan dua program sertifikasi internasional dari Harvard Business School Online, yaitu *Entrepreneurship in Emerging Economies* dan *Justice Today: Money, Markets, and Morals*. Keahlian akademik dan profesional beliau meliputi bidang manajemen kampanye pemasaran (*campaign management*), periklanan (*advertising*), pemasaran digital (*online marketing*), dan perilaku konsumen (*consumer behavior*). Kombinasi antara latar belakang pendidikan, pengalaman praktis, serta pencapaian akademik internasional menjadikan beliau sebagai tenaga pengajar sekaligus praktisi yang berkompeten dalam menjembatani teori dan praktik dalam dunia bisnis digital masa kini.

Email Penulis: nidanurlivifauziyah@gmail.com



BAB 5
KOPERASI SEBAGAI
SOKOGURU EKONOMI
KERAKYATAN

Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai kolektivisme, seperti gotong royong dan musyawarah, memiliki landasan sosiokultural yang kuat untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu wujud nyata dari sistem tersebut adalah koperasi, yang oleh para pendiri bangsa telah digagas sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat.

Dalam Pembukaan UUD 1945, cita-cita untuk membangun “kesejahteraan umum” menjadi dasar utama kebijakan ekonomi nasional. Lebih lanjut, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Kalimat ini menjadi landasan filosofis bagi koperasi sebagai sistem ekonomi alternatif yang menolak praktik ekonomi liberal yang eksploitatif dan menolak pula dominasi negara yang terlalu kuat dalam sistem ekonomi sentralistik (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945).

Koperasi tidak hanya dilihat sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi ekonomi. Bung Hatta, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, menyebut koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme yang individualistik dan komunisme yang kolektivistik secara paksa. Dalam pandangannya, koperasi mampu menciptakan keadilan ekonomi melalui partisipasi aktif anggota, distribusi keuntungan yang merata, dan pengambilan keputusan secara demokratis.

Dengan prinsip-prinsip dasar seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi ekonomi anggota, serta otonomi dan kemandirian, koperasi menjadi entitas unik dalam sistem ekonomi modern yang cenderung kompetitif dan individualistik.

Konsep sokoguru ekonomi kerakyatan mengandung makna bahwa koperasi tidak hanya pelengkap, tetapi fondasi utama dalam sistem ekonomi nasional. Di tengah ketimpangan distribusi kekayaan, maraknya kapitalisasi sektor-sektor strategis oleh segelintir elite, serta kerentanan ekonomi masyarakat kecil, koperasi hadir sebagai solusi struktural.

Zamroni, RI and Organization, (2012) menekankan bahwa koperasi yang kuat adalah koperasi yang didukung oleh anggota yang sadar dan aktif secara ekonomi dan organisasi.

b. Membangun Solidaritas dan Kepercayaan Sosial

Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, tetapi juga organisasi sosial. Nilai solidaritas, gotong royong, dan saling percaya menjadi pilar yang harus dijaga oleh masyarakat agar koperasi tetap berakar kuat.

c. Mendorong Inovasi Berbasis Kebutuhan Lokal

Masyarakat bisa berperan dalam mendorong inovasi koperasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan daerah. Misalnya:

- Koperasi petani berbasis pertanian organik lokal,
- Koperasi wisata berbasis desa dan kearifan lokal,
- Koperasi pekerja untuk sektor informal.

3. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kekuatan utama untuk mengakselerasi reformasi koperasi. Beberapa bentuk sinergi yang dapat dilakukan:

- Pembentukan koperasi modern hasil kerja sama desa dan pemerintah daerah,
- Program pengembangan koperasi di sektor strategis (pangan, energi, digital),
- Skema *matching fund* antara pemerintah dan komunitas koperasi.

Simpulan

Penempatan koperasi sebagai sokoguru ekonomi nasional bukanlah sekadar retorika, melainkan panggilan konstitusional dan historis dalam membangun sistem ekonomi Indonesia yang adil, demokratis, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat dalam memperkuat institusi koperasi melalui regulasi, pendidikan, pendanaan, dan digitalisasi.

Predikat “sokoguru” harus dimaknai sebagai tanggung jawab besar untuk menjadikan koperasi sebagai penggerak utama dalam

membangun ekonomi yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan kemandirian ekonomi rakyat.

Koperasi, sebagai badan usaha yang berakar pada nilai-nilai gotong royong, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial, telah lama digadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun dalam praktiknya, koperasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang menghalanginya untuk berkembang optimal.

Revitalisasi dan transformasi koperasi adalah kebutuhan mendesak agar koperasi tetap relevan dan mampu bersaing di tengah ekonomi global dan era digital. Strategi yang harus diambil mencakup reformasi regulasi, digitalisasi operasional, penguatan SDM, modernisasi model bisnis, serta peningkatan kepercayaan publik. Bila dijalankan dengan konsisten dan kolaboratif, koperasi dapat kembali menjadi institusi ekonomi yang tangguh, adil, dan inklusif.

Berbagai studi dan laporan menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih relatif rendah. Koperasi juga kerap dianggap sebagai lembaga ekonomi kelas dua, yang hanya berperan di sektor informal atau usaha kecil menengah. Padahal, di banyak negara maju seperti Finlandia, Kanada, Jepang, dan Jerman, koperasi menjadi pilar utama ekonomi rakyat dan memainkan peran strategis dalam stabilisasi harga, distribusi keadilan ekonomi, hingga inovasi sosial.

Peran pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat koperasi sangat krusial dan saling melengkapi. Pemerintah perlu hadir melalui kebijakan yang inklusif, insentif, dan fasilitasi yang mendorong koperasi tumbuh secara sehat. Sementara masyarakat memegang peran utama dalam menjaga semangat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Tanpa sinergi antara keduanya, koperasi akan sulit berkembang secara berkelanjutan dan modern di tengah tantangan global.

Daftar Pustaka

- Beamish, P. W., & Lupton, N. C. (2016). Cooperative strategies in international business and management: Reflections on the past 50 years and future directions. *Journal of World Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2015.08.013>
- Budhisulistiyawati, A., Budi Kharisma, D., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2020). The role of cooperatives in Indonesian creative economy. *International Journal of Advanced Science and Technology*.
- Halilintar, M. (2018). Cooperatives and economic growth in Indonesia. *European Research Studies Journal*. <https://doi.org/10.35808/ersj/1027>
- Indonesia, U.-U. R., Mubyarto, Suharto, E., Nasution, A., Suroto, Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Mohd, A., Syechalad, N., Hasan, I., & Majid, M. S. A. (2017). The Role of Cooperative in the Indonesian Economy. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*.
- Mubyarto, Suharto, E., Nasution, A., Suroto, Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (1998). Ekonomi Kerakyatan. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. LP3ES.
- Mujiyanti, S. A. (2023). Koperasi Indonesia dan Permasalahannya. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.653>
- Nasution, A., Suroto, Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (2010). Reformasi Koperasi di Indonesia. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. Rajawali Pers.
- Organization, I. L. (2017). Cooperatives and the Sustainable Development Goals: A Contribution to the Post-2015 Development Debate. *ILO Publications*.

- RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (2023). Laporan Perkembangan Koperasi Indonesia 2023. In *ILO Publications*. Kemenkop UKM.
- Suharto, E., Nasution, A., Suroto, Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (2009). Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. Alfabeta.
- Suroto, Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (2014). Koperasi di Tengah Krisis Ekonomi dan Globalisasi. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. Indonesian Cooperative Institute.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Yang, L., & Gan, C. (2020). Cooperative goals and dynamic capability: the mediating role of strategic flexibility and the moderating role of human resource flexibility. *Journal of Business and Industrial Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JBIM-11-2019-0495>
- Zamroni, A., RI, K. K. dan U. K. M., & Organization, I. L. (2012). Permasalahan dan Tantangan Koperasi di Indonesia. In *Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan*. LIPI Press.

PROFIL PENULIS




Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Kerakyatan Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa diawali dari pemahaman bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki struktur sosial yang berlandaskan nilai-nilai kolektivisme, seperti gotong royong dan musyawarah, memiliki landasan sosiokultural yang kuat untuk mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan. Salah satu wujud nyata dari sistem tersebut adalah koperasi, yang oleh para pendiri bangsa telah digagas sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya dibidang manajemen serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang strategi korporat dan bisnis, korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) dibidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Asosiasi Perguruan Tinggi Manajemen Retail Indonesia (APTMRI), Asesor LSP Kimia Industri serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: heruriza11@gmail.com



BAB 6
USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH
(UMKM)

Riski Aprilianti Baharuddin, S.P., S.Pd., M.Pd.
Universitas Patompo



Peran Strategis UMKM dalam Ekonomi Kerakyatan

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi di tingkat nasional. Isu ini sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena sudah sering menjadi bagian dari pembahasan publik. Pengembangan UMKM di Indonesia sejatinya merupakan tanggung jawab bersama, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat sebagai warga negara. Dengan mendorong peran UMKM secara maksimal, diharapkan dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia (Herdinata & Pranatasari, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan sekadar roda penggerak ekonomi, melainkan juga wajah nyata dari semangat ekonomi rakyat. Di balik setiap usaha kecil, ada harapan besar jutaan pekerja dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang hidup di desa terpencil atau tergolong kelompok rentan, menggantungkan masa depan pada sektor ini. UMKM hadir di tengah masyarakat, tumbuh bersama mereka, dan memahami denyut kehidupan sehari-hari.

UMKM memegang peran penting dalam menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi semua lapisan masyarakat. Karena tersebar di berbagai sektor dan wilayah, dari kota besar hingga pelosok desa, UMKM membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi. Tak harus menjadi bagian dari perusahaan besar warga biasa pun bisa ikut berusaha, menghasilkan, dan menikmati hasil jerih payahnya. Dari sinilah tumbuh kekuatan ekonomi yang lebih adil: daya beli masyarakat meningkat, jurang kesenjangan perlahan menyempit, dan rasa kebersamaan dalam pembangunan ekonomi semakin kuat. Inilah wajah ekonomi rakyat yang sesungguhnya inklusif, memberdayakan, dan penuh harapan.

Banyak dari UMKM tumbuh dari akar keluarga, koperasi, atau inisiatif kelompok warga yang punya tujuan bersama: meningkatkan kesejahteraan bersama. Lewat UMKM, orang-orang berkumpul, berbagi pengetahuan, saling menguatkan, dan membentuk jaringan ekonomi yang saling menguntungkan. Semangat gotong royong inilah yang menjadi inti dari ekonomi kerakyatan. Tak hanya menciptakan

Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung sangat penting untuk memperkuat ekosistem digital dan pemasaran daring bagi UMKM. Contohnya, sentra industri kecil tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi, tetapi juga bisa jadi pusat pelatihan digital bagi pelaku usaha untuk belajar *e-commerce*, manajemen media sosial, dan pembuatan konten produk. Selain itu, pameran UMKM yang didukung pemerintah kini banyak yang terintegrasi dengan *platform* digital, sehingga UMKM bisa menjangkau pasar yang lebih luas secara daring. Dengan begitu, UMKM dapat memperluas jaringan, mengenalkan produk ke audiens yang lebih besar, mengumpulkan data konsumen, dan tetap berjualan meski pameran telah usai. Sinergi antara dukungan fisik dan digital ini merupakan langkah strategis untuk membantu UMKM berkembang berkelanjutan di era digital.

Agar dukungan terhadap UMKM benar-benar efektif, dibutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, akademisi, sektor swasta, BUMN, hingga pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah memegang peran penting sebagai penghubung dan pengatur, memastikan setiap pihak memberikan kontribusi yang saling melengkapi dan tidak saling tumpang tindih. Melalui kolaborasi ini, UMKM bisa mendapatkan bantuan yang lebih menyeluruh mulai dari pelatihan, pendampingan, akses pembiayaan, hingga perluasan pasar. Sinergi multipihak ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk tumbuh, berkembang, dan lebih siap menghadapi tantangan di era persaingan yang semakin terbuka.

Selain kerja sama, penyalarsan kebijakan atau harmonisasi regulasi juga menjadi hal penting dalam mendukung UMKM. Terkadang, peraturan yang tumpang tindih antar kementerian, atau antara pemerintah pusat dan daerah, justru menyulitkan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun kerangka kebijakan yang menyatu, jelas, dan berjangka panjang, agar pengembangan UMKM dapat berjalan lebih lancar. Harmonisasi ini penting untuk memangkas birokrasi yang berbelit, menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi, serta memastikan semua program dan inisiatif dukungan benar-benar saling mendukung dalam membangun UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Daftar Pustaka

- Hamzah, M., Maulana Azis, A. Y., Khairuddin, I., Anam, S., & Qudsi, Z. (2023). *Digitalisasi Ekonomi: Peranan E-commerce dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM*. MENAWAN: Jurnal Riset dan Publikasi Ilmu Ekonomi.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). *Panduan penerapan financial technology melalui regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan pada UMKM*. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Republika. (2023, Juli 25). Pemerintah perkuat fintech perluas akses pembiayaan UMKM. Diakses dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rzs8zl457/pemerintah-perkuat-fintech-perluas-akses-pembiayaan-umkm>
- Sari, N., & Hadi, S. (2017). Peran Modal Sosial dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 18(2), 120-135.

PROFIL PENULIS



Riski Aprilian Baharuddin., S.P., S.Pd., M.Pd.

Penulis lahir di Samarinda tanggal 3 April 1981. Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Patempo. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin tahun 2004. Pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Makassar tahun 2010 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia tahun 2021. Penulis tertarik dalam bidang kewirausahaan. Selain menekuni bidang Penelitian dan pengabdian dibidang kewirausahaan, penulis juga membagi pengetahuan dan keahlian kepada masyarakat melalui pelatihan dan workshop kewirausahaan.

Email Penulis: riskyaprilianti81@gmail.com



BAB 7

PERTANIAN RAKYAT

DAN KEDAULATAN

PANGAN

Norbertus Citra Irawan, S.P., M.Sc.
Universitas Tunas Pembangunan Surakarta



Potret Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan

Pertanian rakyat merupakan fondasi utama yang menopang sistem pangan nasional. Lebih dari 80% produksi bahan pangan di Indonesia berasal dari jutaan petani kecil yang menggarap lahan sempit, namun tetap menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan komunitasnya (A. Irawan, 2025). Identitas pertanian rakyat tidak hanya terletak pada skala usahanya yang kecil, melainkan pada nilai sosial, semangat gotong royong, dan kedekatan dengan alam yang menjadi ciri khas pola hidup petani di pedesaan.

Tabel 7.1: Luas Kepemilikan Lahan Petani Kecil Menurut Kabupaten/Kota di Eks Karesidenan Surakarta

Kota/Kabupaten	Jumlah Petani Kecil (RTUP Gurem, < 0,5 ha)	Persentase terhadap Total Petani
Boyolali	Diperkirakan >133.714 rumah tangga	Sekitar 86%
Sukoharjo	Diperkirakan >46.777 rumah tangga	Sekitar 84%
Wonogiri	Diperkirakan >151.264 rumah tangga	Sekitar 77%
Karanganyar	Diperkirakan >115.225 rumah tangga	Sekitar 70%
Sragen	Diperkirakan >114.664 rumah tangga	Sekitar 84%
Klaten	Diperkirakan >107.426 rumah tangga	Sekitar 70%
Kota Surakarta	Diperkirakan >846 rumah tangga	Sekitar 95%

Sumber: Sensus Pertanian 2023 (BPS), data diolah

Kedaulatan pangan menjadi cita-cita besar bangsa yang hanya bisa diwujudkan melalui keberdayaan petani rakyat. Hak untuk memproduksi, mengakses, dan menentukan sistem pangan lokal tidak dapat dicapai tanpa memperkuat posisi petani kecil sebagai aktor utama dalam rantai pasok pangan. Ketika negara bergantung pada impor dan pasar global untuk memenuhi kebutuhan pangan, maka

Kedaulatan pangan tidak akan terwujud selama kebijakan nasional masih berpihak pada stabilisasi instan melalui impor jangka pendek. Negara perlu membangun infrastruktur produksi dari hulu ke hilir, memperkuat peran koperasi, serta menciptakan sistem distribusi yang menjamin keterjangkauan harga tanpa merugikan produsen lokal. Ketika pangan diperlakukan sebagai komoditas strategis dan hak rakyat, maka kemandirian pangan menjadi visi yang bisa dicapai, bukan sekedar slogan.

Daftar Pustaka

- Akbar, A., Salam, M., Arsyad, M., & Rahmadanih, R. (2024). Mediating role of leadership and group capital between human capital component and sustainability of horticultural agribusiness institutions in Indonesia. *Open Agriculture*, 9(1). <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0250>
- Aprianto, N. E. K., & Qur'an, A. A. (2021). Political Economy of the Agricultural Sector in a Review of Development Studies in Indonesia. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 191. <https://doi.org/10.12928/optimum.v11i2.3627>
- Bhattarai, R., & Pandit, M. (2023). Cooperatives as Pillar of Economy to Improve Agriculture Production and Marketing. *Nepal Public Policy Review*, 3(1), 221–238. <https://doi.org/10.59552/nppr.v3i1.61>
- Guampe, F. A., Hasan, M., Huruta, A. D., Dewi, C., & Chen, A. P. S. (2022). Entrepreneurial Literacy of Peasant Families during the COVID-19 Pandemic: A Case in Indonesia. *Sustainability*, 14(19), 12337. <https://doi.org/10.3390/su141912337>
- Irawan, A. (2025). The smallholder coffee farmer's livelihood adaptation strategies in Bengkulu, Indonesia. *Journal of Strategy and Management*, 18(1), 73–95. <https://doi.org/10.1108/J SMA-04-2023-0082>
- Irawan, N. C., Irham, I., Mulyo, J. H., & Suryantini, A. (2023). Unleashing the Power of Digital Farming: Local Young Farmers' Perspectives on Sustainable Value Creation. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 9(2), 316–333. <https://doi.org/10.18196/agraris.v9i2.239>
- Irawan, N. C., Mahananto, Suswadi, Irianto, H., & Santoso, A. (2024). Championing change: enhancing the green knowledge and skill capacities of tobacco farm workers for climate change adaptation and eco-management. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1419(1), 012065. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1419/1/012065>
- Li, H., Feng, J., & Peng, W. (2023). From survival goals to economic rationality: the determinants of farmer households' dual decision regarding land rental area. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1176332>

- Lin, S. Y. (2023). Localization of the corporate food regime and the food sovereignty movement: taiwan's food sovereignty movement under "third regionalism." *Food, Culture & Society*, 26(3), 621–642. <https://doi.org/10.1080/15528014.2022.2030889>
- Mardiharini, M., Jamal, E., Rohaeni, E. S., Indrawanto, C., Indraningsih, K. S., Gunawan, E., Ramadhan, R. P., Fahmid, I. M., Wardana, I. P., & Ariningsih, E. (2023). Indonesian rice farmers' perceptions of different sources of information and their effect on farmer capability. *Open Agriculture*, 8(1). <https://doi.org/10.1515/opag-2022-0200>
- Middendorf, M., & Herzig, C. (2025). Food sovereignty at the organizational level: a framework for characterizing the diversity of economic actors. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2025.1258633>
- Ngongo, Y., Kotta, N., & Matitaputty, P. R. (2021). Strengthening Archipelago Food Security And Food Sovereignty in ENT – Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 803(1), 012032. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/803/1/012032>
- Perdana, T., Tjahjono, B., Kusnandar, K., Sanjaya, S., Wardhana, D., & Hermiatin, F. R. (2023). Fresh agricultural product logistics network governance: insights from small-holder farms in a developing country. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 26(12), 1761–1784. <https://doi.org/10.1080/13675567.2022.2107625>
- Prihadyanti, D., & Aziz, S. A. (2023). Indonesia toward sustainable agriculture – Do technology-based start-ups play a crucial role? *Business Strategy & Development*, 6(2), 140–157. <https://doi.org/10.1002/bsd2.229>
- Purnawan, E., Brunori, G., & Prospero, P. (2021). Financial Support Program for Small Farmers, and Its Impact on Local Food Security. Evidence from Indonesia. *Horticulturae*, 7(12), 546. <https://doi.org/10.3390/horticulturae7120546>
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Food Diversification: Strengthening Strategic Efforts to Reduce Social Inequality through Sustainable Food Security Development in Indonesia. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 36(1), 33. <https://doi.org/10.20961/carakatani.v36i1.41202>

- Supriatna, J., Saluy, A. B., Kurniawan, D., & Djumarno, D. (2025). Promoting sustainable performance of smallholder oil palm farmers: an analysis of key determinants and strategic priorities. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 74(5), 1644–1675. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-12-2023-0647>
- Syaban, A. S. N., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the Complexities of Land Use Transition in Indonesia's New Capital City IKN Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis. *Land*, 13(5), 606. <https://doi.org/10.3390/land13050606>
- Viana, J. G. A., & Waquil, P. D. (2022). Institutions and Agricultural Economics: a theoretical framework from Evolutionary Institutionalism. *Studies in Agricultural Economics*. <https://doi.org/10.7896/j.2265>
- Wittman, H. (2023). Food sovereignty: An inclusive model for feeding the world and cooling the planet. *One Earth*, 6(5), 474–478. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2023.04.011>

PROFIL PENULIS



Norbertus Citra Irawan, S.P., M.Sc.

Penulis Lahir di Surakarta pada tanggal 5 Juni 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis), Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 2007. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Magister Ekonomi Pertanian, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 2010.

Saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 Doktor Ilmu Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penulis saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Program Studi Agribisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta (UTP).

Penulis memiliki kepakaran di bidang kewirausahaan, agroindustri, agrowisata, ekonomi sumberdaya, ekonomi pertanian, digital farming, kebijakan pertanian, dan pembangunan berkelanjutan. Penulis juga sudah mempublikasikan karya ilmiah di journal terindeks internasional dan nasional. Penulis sudah berkolaborasi dengan berbagai peneliti dan penulis dari berbagai institusi nasional. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Melalui buku ini penulis berharap memiliki kontribusi pada kajian Ekonomi Kerakyatan, secara khusus pada pertanian rakyat dan kedaulatan pangan.

Email: irawan@lecture.utp.ac.id



BAB 8

EKONOMI KREATIF

DAN POTENSI LOKAL

Amanna Dzikrillah Lazuardini, S.S., M.B.A.
Universitas Nusa Putra



Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep yang semakin berkembang dalam masyarakat modern dan memiliki berbagai definisi menurut para ahli. Menurut Kusumawardani et al. (Kusumawardani et al., 2023), ekonomi kreatif merujuk pada penggunaan daya cipta, pengetahuan, dan keterampilan untuk menghasilkan produk dan layanan yang bernilai. Dalam ekonomi kreatif, sumber daya utama bukan lagi sekadar bahan baku fisik atau tenaga kerja manual, melainkan ide-ide orisinal, kemampuan berimajinasi, dan keterampilan intelektual yang dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*).

Jika dibandingkan dengan ekonomi tradisional, ekonomi kreatif memiliki beberapa perbedaan fundamental. Dalam ekonomi tradisional, nilai ekonomi dihasilkan melalui eksploitasi sumber daya alam atau tenaga kerja fisik dalam skala produksi massal. Sebaliknya, ekonomi kreatif mengandalkan sumber daya intelektual sebagai aset utama, dimana produk dan jasa dihasilkan memiliki keunikan dan inovasi yang sulit untuk direplikasi secara massal. Dalam konteks ini, ekonomi kreatif jauh lebih tinggi dalam nilai tambah karena mengedepankan inovasi dan kreativitas, menciptakan produk dan layanan baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat (Sa'adah & Oktavia, 2022).

Ruang lingkup ekonomi kreatif pun sangat luas dan mencakup berbagai sektor industri. Beberapa sektor kerap disebut diberbagai klasifikasi antara lain: seni pertunjukan (musik, teater, tari), film, desain (grafis, produk, interior), arsitektur, fashion, kuliner, kerajinan tangan, penerbitan, pengembangan perangkat lunak dan aplikasi digital, permainan interaktif (*game*), periklanan, fotografi, hingga televisi dan radio. Sektor ini mencerminkan kekayaan keragaman aktivitas ekonomi yang tumbuh dari kreativitas masyarakat.

Peran Ekonomi Kreatif dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi kreatif memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan global dengan memberikan kontribusi

Untuk memastikan keberhasilan roadmap ini, diperlukan sistem indikator pengukuran kinerja yang komprehensif, seperti Indeks Ekonomi Kreatif Daerah, tingkat pertumbuhan wirausaha kreatif baru, indeks kesejahteraan komunitas kreatif, hingga capaian kontribusi sektor kreatif terhadap PDB daerah. Implementasi roadmap penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal harus bersifat adaptif dan fleksibel mengikuti dinamika sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi kreatif benar-benar dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus memajukan budaya bangsa.

Kesimpulan

Ekonomi kreatif telah muncul sebagai pilar baru dalam pembangunan ekonomi global, nasional, maupun lokal. Di tengah keterbatasan sumber daya alam, ketidakpastian global, dan perubahan pola konsumsi masyarakat, ekonomi kreatif menawarkan model pembangunan yang berbasis pada kekuatan intelektual, inovasi, dan identitas budaya. Dalam konteks Indonesia negara yang sangat kaya akan keragaman budaya, kearifan lokal, dan warisan tradisi ekonomi kreatif berbasis potensi lokal menjadi strategi yang sangat relevan, sekaligus strategis untuk memperkuat daya saing bangsa.

Pembahasan dalam buku ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif bukan sekadar aktivitas bisnis biasa, melainkan sebuah ekosistem yang melibatkan banyak dimensi. Mulai dari penguatan sumber daya manusia kreatif, pengembangan infrastruktur teknologi, dukungan regulasi dan pembiayaan, hingga sinergi multipihak antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Semua elemen ini harus berjalan secara terintegrasi agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi lahirnya inovasi, tumbuhnya wirausaha kreatif, dan terjaganya nilai-nilai budaya lokal.

Penting untuk dipahami bahwa pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan produk-produk kreatif semata, melainkan juga sebagai sarana pelestarian budaya, pemberdayaan komunitas, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengangkat

kearifan lokal ke dalam produk kreatif modern, masyarakat tidak sekadar menciptakan komoditas ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas kultural yang memperkaya keberagaman dunia.

Berbagai tantangan yang diidentifikasi dalam pengembangan potensi lokal mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, akses permodalan, adopsi teknologi, hingga ancaman komersialisasi budaya menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif memerlukan pendekatan yang holistik. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik, inovasi model bisnis, penguatan jejaring pasar digital, serta pengembangan model pengelolaan berbasis komunitas menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi kreatif di tingkat lokal.

Melalui roadmap pengembangan jangka pendek, menengah, dan panjang, arah penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal menjadi lebih terukur dan sistematis. Dengan evaluasi yang berkelanjutan, pengembangan ini tidak hanya akan memperluas kontribusi sektor kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sosial, lingkungan, dan budaya.

Daftar Pustaka

- Aditiawati, P., Astuti, D. I., Suantika, G., & Simatupang, T. M. (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sosioteknologi*. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.1.6>
- Dewanti, D. S., & Diana, W. (2022). Pembangunan Eco Tourism Di Desa Kalisemo. *Dedikasimu Journal of Community Service*. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v4i4.4853>
- Fatmala, K., Nurliza, N., & Aritonang, M. (2022). Pengembangan Produk Pandan Duri Melalui Quadruple Helix Di Kabupaten Kubu Raya. *Dinamika Kerajinan Dan Batik Majalah Ilmiah*. <https://doi.org/10.22322/dkb.v39i2.7368>
- Gómez-Reyes, F. M., Catalá-Pérez, D., & Miguel Molina, M. de. (2021). *The Role of Public Policies in Enhancing Cultural and Creative Industries: An Analysis of Public Policies Related to Music in Colombia*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-76882-9_3
- Kusumawardani, N., Meidasari, E., & Sukmasari, D. (2023). Peningkatan Kompetensi Wirausaha Ekonomi Kreatif Bagi Siswa Kejuruan Melalui Produk Kerajinan Tangan. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*. <https://doi.org/10.59025/js.v2i4.166>
- Muzakir, M., & Suastra, W. (2024). Kearifan Lokal Suku Sasak Sebagai Sumber Nilai Pendidikan Di Persekolahan: Sebuah Kajian Etnopedagogi. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.6067>
- Nasarudin, & Ahyuni, S. (2023). Strategi Pendampingan Industri Kreatif Menengah Kerajinan Baduy Berbasis Local Wisdom: Tinjauan Model Triple Helix. *JSCSR*. <https://doi.org/10.61511/jscsr.v1i1.2023.164>
- Parekh, N. (2024). Creative Industries and Economic Value: A Review of Innovation, Impact, and Policy Support. *Iosr Journal of Business and Management*. <https://doi.org/10.9790/487x-2611013949>

- Parker, R., Cox, S., & Thompson, P. (2015). The Dynamics of Global Visual Effects and Games Development Industries: Lessons for Australia's Creative Industries Development Policy. *International Journal of Cultural Policy*.
<https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1064118>
- Purnama, I. N. (2023). Penerapan Model Triple Helix Dalam Pengembangan Industri Kreatif Di Kota Serang. *Senaskah*.
<https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.110>
- Sa'adah, L., & Oktavia, F. I. (2022). Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Zaman Kopi Sengon Jombang. *Jpek (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v6i2.6445>
- Solihah, Z. A., Nurhayati, R., Apipah, F. T., Aprily, N. M., & Sutisna, R. (2024). Nilai-Nilai Payung Geulis Kota Tasikmalaya Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*.
<https://doi.org/10.33387/cahayapd.v6i1.7223>
- Susanty, A., Handayani, N. U., & Jati, P. A. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Klaster Batik Pekalongan (Studi Kasus Pada Klaster Batik Kauman, Pesindon Dan Jenggot). *J Ti Undip Jurnal Teknik Industri*.
<https://doi.org/10.12777/jati.8.1.1-14>

PROFIL PENULIS




Amanna Dzirkillah Lazuardini, S.S., M.B.A.

Penulis adalah individu yang penuh semangat dengan latar belakang pendidikan Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Selama masa studinya, penulis telah membangun fondasi yang kuat dalam pengelolaan bisnis dan pengembangan strategi, yang menjadi dasar bagi ketertarikannya yang mendalam pada manajemen tim, seni, seni pertunjukan, serta manajemen bisnis. Kecintaan penulis terhadap seni dan seni pertunjukan bukan hanya sekadar hobi, tetapi juga sebuah bentuk ekspresi yang menginspirasi. Dalam berbagai kesempatan, penulis kerap terlibat dalam proyek-proyek seni dan kegiatan kreatif yang memadukan nilai artistik dengan manajemen strategis. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi hubungan dinamis antara kreativitas dan efisiensi, dua elemen yang ia percaya menjadi kunci keberhasilan dalam dunia bisnis modern.

Selain itu, penulis juga memiliki bakat alami dalam memimpin dan mengelola tim. Kemampuannya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan memberdayakan menjadi salah satu keunggulannya. Penulis percaya bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang penuh dukungan dan apresiasi terhadap kontribusi individu.

Dengan wawasan mendalam tentang seni, manajemen, dan bisnis, penulis berkomitmen untuk terus belajar dan berkontribusi di berbagai bidang. Visi penulis adalah memadukan kreativitas dan pengelolaan tim secara efektif untuk menciptakan dampak positif, baik dalam dunia seni maupun bisnis.



BAB 9

AKSES PERMODALAN

DAN KEUANGAN

INKLUSIF

Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.
Universitas Primagraha



yang tidak tersentuh layanan keuangan konvensional. Di sisi lain, transformasi ini juga menciptakan tantangan baru, termasuk eksklusi digital, ketimpangan akses internet, serta risiko penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa upaya memperluas akses permodalan dan keuangan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan kualitas, keberlanjutan, dan perlindungan bagi pengguna layanan.

Bab ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara akses permodalan dan keuangan inklusif, dengan menelaah konsep dasar, kondisi terkini, tantangan yang dihadapi, serta strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan bab ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan dan strategi keuangan yang inklusif, adil, dan berdampak luas bagi pembangunan ekonomi nasional.

Konsep Akses Permodalan

Permodalan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat esensial dalam kegiatan ekonomi, baik dalam skala mikro maupun makro (Hukom & Ompusunggu, 2023). Modal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memulai usaha, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis, melakukan ekspansi, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dalam konteks pembangunan ekonomi, ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh modal menjadi indikator penting bagi keberhasilan suatu negara dalam menciptakan struktur ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Secara definisional, permodalan dapat dipahami sebagai segala bentuk sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan usaha (Hertadiani & Lestari, 2021). Modal dapat berupa modal finansial (uang tunai), modal fisik (peralatan dan fasilitas), maupun modal manusia (pengetahuan dan keterampilan). Namun, dalam konteks pembiayaan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat, permodalan lebih sering merujuk pada akses terhadap sumber dana yang memungkinkan pelaku usaha menjalankan dan mengembangkan usahanya.

kemiskinan dan ketimpangan. Data terkini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan volume kredit kepada sektor UMKM, masih terdapat ketimpangan struktural, baik secara geografis, gender, maupun antar-segmen usaha mikro, kecil, dan menengah. Berbagai institusi keuangan baik konvensional maupun alternatif seperti fintech dan koperasi telah berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan, namun masih dibayangi oleh tantangan literasi, digitalisasi yang belum merata, serta eksklusi baru akibat ketimpangan teknologi.

Salah satu temuan penting adalah bahwa lembaga keuangan formal masih belum sepenuhnya mampu menjangkau pelaku usaha kecil dan mikro yang berada di wilayah tertinggal atau tergolong unbanked. Di sisi lain, kehadiran lembaga keuangan mikro, koperasi, dan fintech menawarkan solusi alternatif, namun harus disertai tata kelola yang baik dan perlindungan konsumen yang kuat. Program-program pemerintah seperti KUR, UMi, dan LPDB-KUMKM menjadi pendorong utama perluasan akses permodalan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sistem pendampingan, digitalisasi prosedur, dan kesesuaian produk dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Implikasi kebijakan yang dapat ditarik dari analisis ini mencakup perlunya integrasi yang lebih erat antara sektor keuangan formal dan informal. Pemerintah bersama OJK dan BI perlu memperkuat regulasi yang mendukung karakteristik pelaku usaha mikro, seperti penerapan credit scoring berbasis data non-tradisional, digitalisasi koperasi, serta pendekatan pembiayaan berbasis komunitas. Literasi keuangan dan digital menjadi syarat mutlak agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak dan produktif. Selain itu, desain produk pembiayaan harus lebih fleksibel dan adaptif terhadap kondisi riil masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat pedesaan.

Rekomendasi strategis ke depan mencakup penguatan ekosistem inklusi keuangan melalui kolaborasi multipihak: lembaga keuangan, kementerian teknis, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Pengembangan sistem pelatihan terpadu tentang keuangan, digitalisasi UMKM, dan literasi perlindungan konsumen dapat menjadi investasi sosial jangka panjang. Selain itu, penting

untuk meningkatkan insentif bagi lembaga keuangan yang secara aktif melayani kelompok usaha mikro dan daerah tertinggal, misalnya melalui skema subsidi risiko, pengurangan pajak, atau kemitraan operasional dengan lembaga non-bank berbasis komunitas.

Arah pengembangan ke depan untuk sistem permodalan dan keuangan inklusif di Indonesia harus diarahkan pada pembentukan infrastruktur keuangan yang adaptif, inklusif, dan terhubung secara digital. Penerapan teknologi seperti *big data*, *blockchain*, dan *artificial intelligence* harus dimanfaatkan secara etis untuk memperluas akses dan menilai kelayakan kredit secara lebih adil. Ekosistem ekonomi digital yang semakin berkembang dapat dijadikan wahana untuk memperluas pembiayaan berbasis transaksi, integrasi koperasi digital, dan skema pembiayaan alternatif seperti urun dana atau *peer-to-peer lending* berbasis komunitas.

Dengan sinergi antara regulasi yang berpihak, inovasi teknologi yang inklusif, dan pemberdayaan masyarakat, sistem permodalan dan keuangan Indonesia ke depan dapat tumbuh menjadi lebih adil, merata, dan berkelanjutan. Agenda keuangan inklusif bukan sekadar soal menyediakan akses, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan sosial. Dalam konteks ini, upaya memperluas inklusi keuangan harus terus menjadi prioritas lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, H. (2018). Analisis Penerapan Brilink Di Bank BRI Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 211–247.
- Diana, R. (2019). Analisis Aksesibilitas Permodalan Usaha Mikro Kecil Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 27, 67–80. <https://doi.org/10.14203/JEP.27.1.2019.67-80>
- Hertadiani, V. W., & Lestari, D. (2021). Pengaruh inklusi keuangan dan pengelolaan keuangan terhadap kinerja UMKM sektor kuliner di Jakarta Timur. *KALBISOCIO Jurnal Bisnis Dan Komunikasi*, 8(2), 19–31.
- Hukom, A., & Ompusunggu, D. P. (2023). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Penerbit Qiara Media.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, I., Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kemenkeu. (2024). *Keuangan Inklusif di Indonesia*.
- Susanto, L. (2024). *Mendobrak Ketimpangan Akses Keuangan di Perdesaan*.
- Suseno, J., Asyhari, H., & Saputra, M. A. (2025). Dampak Digitalisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Dan Sains*, 2(1), 432–438.
- Tempo. (2021). *Survei Bank Indonesia: 43,1 Persen UMKM Butuh Kredit, tapi Belum Dapat*.
- Tempo. (2025). *69,5 Persen Pelaku UMKM Tidak Punya Akses Kredit Perbankan*.
- Tengah, P. I. I. D. J. (2024). *UMKMIN : Inovasi Aplikasi Digital Berbasis AI Matching Sebagai Platform Penghubung UMKM Dan Investor Untuk Penguatan Daya Saing Daerah*.

PROFIL PENULIS



Septantri Shinta Wulandari, S.E., M.E.

Septantri Shinta Wulandari lahir di Tangerang pada tanggal 27 September 1987, dan menetap di Perumahan Nuansa Alam Banjar Kota Serang. Dengan pencapaian akademik pendidikan telah selesai di tingkat Dasar pada MI Nurul Ghosyiah Ciputat Tangerang Selatan pada tahun 1999, kemudian menyelesaikan Tingkat pendidikan lanjutan di MTSN Takeran pada tahun 2004, dan di tahun 2007 berhasil menyelesaikan tingkat pendidikan atas di SMK Muhammadiyah Tangerang. Gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) dengan Konsentrasi Keilmuan Manajemen Sumberdaya Manusia diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ganesha pada tahun 2014, dan pada tahun 2021 telah berhasil memperoleh Gelar Magister Ekonomi (ME) dengan konsentrasi Keilmuan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saat ini penulis merupakan tenaga pengajar di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha sejak tahun 2022 hingga saat ini. Beberapa karya ilmiah telah dihasilkan dan telah terpublikasi skala internasional bereputasi terindeks scopus Q1 yang termuat di *Journal of Islamic Marketing*, dengan Emerald Publishing sebagai penerbit.

Email: septantri.shinta@gmail.com



BAB 10

PAJAK PROGRESIF DAN

KEADILAN DISTRIBUSI

Nurlaila Hanum, S.E., M.Si.
Universitas Samudra



Konsep Dasar Pajak Progresif

1. Definisi Pajak Progresif

Pajak progresif adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pendapatan atau kekayaan yang dikenakan pajak. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar persentase pendapatan yang harus dibayarkan sebagai pajak. Sistem ini bertujuan untuk mencerminkan prinsip *ability to pay*, yaitu bahwa individu atau entitas dengan kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya menanggung beban fiskal yang lebih besar pula.

Sebagai contoh, dalam sistem pajak penghasilan progresif, pendapatan hingga Rp 50 juta per tahun mungkin dikenakan tarif 5%, sementara pendapatan di atas Rp500 juta dapat dikenakan tarif hingga 30%. Hal ini menciptakan beban pajak yang meningkat secara proporsional terhadap kapasitas ekonomi wajib pajak.

2. Perbandingan dengan Sistem Pajak Lain

Untuk memahami keunikan pajak progresif, penting untuk membandingkannya dengan dua sistem alternatif lainnya:

a. Pajak proporsional (*flat tax*)

Semua wajib pajak dikenai tarif pajak yang sama, tanpa memperhatikan tingkat pendapatan. Misalnya, semua individu dikenai pajak 10% dari penghasilannya, baik mereka berpenghasilan rendah maupun tinggi.

b. Pajak regresif

Dalam sistem ini, persentase pajak yang dibayar menurun seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pajak konsumsi seperti PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sering dianggap regresif karena mengambil proporsi yang lebih besar dari pendapatan orang miskin daripada orang kaya, mengingat kelompok miskin cenderung menghabiskan seluruh pendapatannya.

3. Rasionalitas Ekonomi dan Moral Pajak Progresif

Dari sudut pandang ekonomi dan etika, pajak progresif memiliki sejumlah pembenaran:

a. Efisiensi Redistributif

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

1. Kesimpulan

Pajak progresif memiliki posisi sentral dalam perdebatan mengenai keadilan distribusi. Sebagai instrumen fiskal, pajak progresif tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan ekonomi yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Berdasarkan perspektif teori:

- a. John Rawls mendukung redistribusi yang menguntungkan kelompok paling lemah;
- b. Amartya Sen menekankan perlunya pajak untuk meningkatkan kemampuan dasar warga negara;
- c. Sementara Robert Nozick mengkritisi pajak progresif sebagai pelanggaran atas hak milik individu.

Studi kasus di Indonesia dan negara-negara Skandinavia menunjukkan bahwa struktur tarif progresif saja tidak cukup. Efektivitas redistribusi sangat tergantung pada kualitas institusi perpajakan, tingkat kepatuhan, transparansi penggunaan pajak, dan kesadaran warga negara terhadap pentingnya kontribusi fiskal.

Tantangan besar seperti penghindaran pajak, resistensi politik, dan ketimpangan kekayaan yang lebih ekstrem daripada pendapatan, menuntut kebijakan perpajakan yang lebih cermat, terukur, dan berkeadilan.

2. Rekomendasi Kebijakan

Berikut beberapa rekomendasi untuk memperkuat peran pajak progresif dalam mewujudkan keadilan distribusi:

- a. Reformasi Administrasi Perpajakan
 - Digitalisasi sistem perpajakan secara menyeluruh (e-filing, e-audit).
 - Integrasi data antar-instansi untuk mempersempit ruang penghindaran pajak.
 - Penguatan kapasitas SDM Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Penegakan Hukum terhadap Penghindaran Pajak
 - Menutup celah hukum (*loopholes*) yang sering digunakan oleh kelompok kaya.

- Penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian pertukaran informasi pajak internasional.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penggunaan Pajak
- Memastikan dana dari pajak progresif dialokasikan untuk sektor yang memperkuat kapabilitas masyarakat (pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial).
 - Meningkatkan literasi fiskal masyarakat agar tercipta kontrol sosial terhadap kebijakan pajak.
- d. Evaluasi Ulang terhadap Pajak Kekayaan
- Mempertimbangkan pengenaan pajak warisan, pajak properti progresif, atau pajak atas kekayaan bersih (*net wealth tax*), untuk menanggulangi ketimpangan kekayaan yang ekstrem.
 - Perlu kajian teknis mendalam agar pajak ini tidak menyebabkan pelarian aset (*capital flight*).
- e. Harmonisasi Pajak Nasional dan Daerah
- Menghindari tumpang tindih pajak yang menurunkan efektivitas dan merusak persepsi keadilan.
 - Mendorong desain sistem pajak daerah yang progresif dan proporsional terhadap kapasitas fiskal lokal.

Dengan pendekatan yang tepat, pajak progresif dapat menjadi fondasi dari sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan inklusif. Keadilan distribusi bukan sekadar ideal moral, melainkan prasyarat stabilitas sosial dan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

“Pajak adalah harga yang kita bayar untuk masyarakat yang beradab.” (Oliver Wendell Holmes Jr)

Daftar Pustaka

- Bird, R. (2005). *Redistribution via taxation: The limited role of the personal income tax in developing countries*. *UCLA Law Review*, 52(6), 1627–1695.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Statistik Pajak 2023*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Laffer, A. B. (1979). *The Economics of The Tax Revolt*. Institute for Contemporary Studies.
- Nozick, R. (1974). *Anarchy, State, and Utopia*. Basic Books.
- OECD. (2021). *Income Inequality and Redistribution: OECD Economic Outlook*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/economy/outlook/>
- OECD. (2023). *Revenue statistics 2023*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/rev_stats-2023-en
- Piketty, T. (2013). *Capital in The Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*. W. W. Norton & Company.
- World Bank. (2023). *World Development Indicators*. <https://databank.worldbank.org/>

PROFIL PENULIS



Nurlaila Hanum, S.E., M.Si.

Penulis tertarik terhadap ilmu ekonomi dimulai pada tahun 1981 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dengan memilih Jurusan Ekonomi Pembangunan dan meraih gelar S.E. Penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada program studi Magister Ekonomi

Pembangunan Universitas Sumatera Utara pada tahun 2004 dan meraih gelar M.Si. dengan predikat cumlaude. Penulis aktif mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra, Langsa, Aceh, sejak status kampus masih swasta mulai tahun 1988 hingga sekarang status kampus sudah menjadi perguruan tinggi negeri. Penulis mengampu mata kuliah teori ekonomi mikro, ekonomi makro dan ekonomi kependudukan pada program studi ekonomi pembangunan. Penulis pernah menjabat sebagai sekretaris Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Penulis juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai kontribusi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi. Selain itu penulis juga mulai tertarik untuk menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi kemajuan pengetahuan terutama di bidang ekonomi.

Email Penulis: nurlailahanum123@gmail.com



BAB 11

EKONOMI HIJAU DAN

ENERGI TERBARUKAN

Dr. Ir. Hardjanto Nusantoro, M.M.
Universitas Raharja



Pendahuluan

Paradigma ekonomi global dari pertumbuhan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam, saat ini sedang bergeser menuju pembangunan berkelanjutan, telah melahirkan konsep baru dikenal ekonomi hijau (*green economy*). Di tengah krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap ketahanan energi, ekonomi hijau menawarkan jalan tengah mengedepankan keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Dalam konteks ekonomi kerakyatan, ekonomi hijau memperkuat prinsip-prinsip kemandirian dan keadilan dengan memberdayakan masyarakat lokal melalui praktik ramah lingkungan. Energi terbarukan menjadi elemen kunci yang menopang transformasi ini. Dengan memanfaatkan sumber energi yang bersih dan terbarukan, Indonesia dapat memperkuat ketahanan energi nasional dan menciptakan peluang ekonomi baru di berbagai wilayah, terutama daerah tertinggal.

Prinsip Dasar Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, sekaligus secara signifikan mengurangi risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan terhadap kelangkaan sumber daya alam. Ekonomi Hijau meliputi 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

1. Efisiensi Sumber Daya dan Energi

Efisiensi berarti memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tanpa pemborosan, baik berupa sumber daya air, energi, maupun bahan mentah lainnya. Dalam ekonomi hijau, efisiensi dapat dicapai dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, daur ulang, serta pola konsumsi yang hemat energi untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang.

2. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi gas rumah kaca yang berasal dari industri, kendaraan, dan pembakaran bahan fosil, telah menjadi penyebab utama perubahan iklim. Prinsip ini menekankan pengurangan emisi melalui transisi ke energi terbarukan (misal energi matahari, angin, air dan biomassa), efisiensi energi, dan praktik ekonomi rendah karbon dalam melakukan proses produksi serta konsumsi.

biogas, dan mikrohidro. Hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat berupa:

- a. Lebih dari 25.000 rumah tangga menikmati listrik
- b. Produktivitas pertanian dan perikanan meningkat
- c. Terbentuknya koperasi energi yang mengelola pembangkit bersama

2. Koperasi Biogas di Klaten

Peternak sapi di Klaten membentuk koperasi untuk memanfaatkan limbah ternak menjadi biogas. Biogas ini digunakan untuk memasak dan dijual ke warga sekitar. Dampak positif yang dirasakan masyarakat berupa:

- a. Pengurangan pengeluaran untuk pembelian bahan bakar LPG
- b. Lingkungan menjadi lebih bersih
- c. Memperoleh pendapatan tambahan bagi peternak

3. Urban Farming Berbasis Ekonomi Hijau di Jakarta

Komunitas warga di Jakarta mengembangkan pertanian vertikal dengan sistem hidroponik dan panel surya di atap rumah. Selain untuk konsumsi, hasil panen juga dijual ke pasar lokal, mendukung ekonomi sirkular perkotaan.

Strategi Mendorong Ekonomi Hijau di Tingkat Nasional

Pemerintah perlu menetapkan strategi untuk mendorong pelaksanaan ekonomi hijau di Tingkat nasional sebagai berikut:

1. Integrasi dalam RPJMN dan RKP daerah, ekonomi hijau harus menjadi agenda prioritas pembangunan nasional dan daerah.
2. Penguatan kelembagaan hijau, mendorong pembentukan badan-badan riset dan pembiayaan transisi energi.
3. Skema pembiayaan inovatif, *Green bonds* dana bergulir untuk koperasi energi, atau skema berbagi hasil usaha melalui profit sharing.
4. Inklusi pendidikan dan literasi hijau, kurikulum hijau sejak usia dini dan pelatihan vokasi berbasis green jobs, pekerjaan yang terkait dengan ekonomi hijau.

5. Pemanfaatan digitalisasi, penggunaan Internet of Things (IoT) untuk pengelolaan energi desa terbarukan, *marketplace* produk hijau, dan transparansi pengelolaan sumber daya.

Jalan Menuju Keadilan Ekologis dan Kemandirian Energi

Ekonomi hijau dan energi terbarukan bukan sekadar pilihan teknis, melainkan keharusan moral dan strategi pembangunan masa depan. Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, transisi menuju ekonomi hijau memungkinkan terciptanya sistem ekonomi yang adil, mandiri, dan lestari.

Ekonomi hijau dan energi terbarukan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat, mendorong inovasi lokal, dan membangun sistem energi bersih, Indonesia dapat membuktikan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak harus mengorbankan alam. Justru, harmoni antara manusia dan alam menjadi fondasi bangsa yang tangguh dan berdaulat.

Daftar Pustaka

- BPPT. (2019). *Peta Potensi Energi Terbarukan Indonesia*. Jakarta: Badan
- Greenpeace Indonesia. (2020). *Potensi Energi Terbarukan di Wilayah Timur Indonesia*. Jakarta: Greenpeace Southeast Asia
- International Renewable Energy Agency (IRENA). (2020). *Renewable Energy: A Gender Perspective*. IRENA. <https://www.irena.org/publications>
- Ministry of Energy and Mineral Resources of Indonesia. (2023). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023*. Jakarta: Directorate General of Electricity.
- Saragih, D. A., & Prasetyo, A. (2021). Strategi Pembangunan Energi Panas Bumi Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Teknologi Energi*, 8(1), 23–31.
- Sugiharto, T. (2022). Potensi Energi Biomassa di Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Energi Terbarukan Indonesia*, 10(2), 45–55.
- World Bank. (2022). *Indonesia Energy Transition Outlook*. <https://www.worldbank.org/en/topic/energy>

PROFIL PENULIS




Dr. Ir. Hardjanto Nusantoro, M.M.

Penulis adalah seorang praktisi dan dosen tetap yang mengajar pada Prodi Manajemen Ritel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, di Universitas Raharja, Tangerang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 nya di jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung. Ketertarikan penulis pada bidang manajemen, telah mendorong penulis untuk melanjutkan studi

S2 Program Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya Penulis menyelesaikan Pendidikan S3 nya dalam bidang Administrasi Bisnis, di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Sebagai dosen praktisi, penulis mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun menduduki posisi manajerial dan *Top Management* di beberapa Perusahaan yang bergerak dalam bidang kimia dan Industri manufacturing. Penulis memiliki kepakaran dalam bidang manajemen produksi, manajemen strategi korporasi dan pada saat ini penulis tertarik untuk mendalami bidang "*green corporate strategy*". Sebagai praktisi dalam bidang industri, penulis sadar bahwa suatu industri dalam menjalankan aktivitasnya selain memberikan manfaat ekonomi, seringkali dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan terhadap lingkungan jika tidak dikelola secara bertanggung jawab. Untuk itu sangat diperlukan Strategi Bisnis yang Berkelanjutan, yang mengacu pada dimensi *3P (Profit, People, Planet)* dan Keputusan Investasi yang Berkelanjutan yang mengacu pada standar *ESG (Environmental, Social, Governance)*.

Email : hardjanto.nusantoro@raharja.info



BAB 12

PENGEMBANGAN

EKONOMI BERBASIS

PESANTREN

Siti Masruroh, S.E., M.E.
Institut Agama Islam Badrus Sholeh



Pendahuluan

Istilah “pesantren” berasal dari kata “santri,” yang diawali dengan “pe” dan diakhiri dengan “an,” sehingga berubah menjadi “pesantrian.” Adaptasi linguistik ini terjadi dalam bahasa Jawa, yang memfasilitasi pengucapan “pesantrian” melalui istilah “pesantren,” awalnya digunakan untuk merujuk pada individu tetapi kemudian digunakan kembali untuk menunjukkan lokasi tertentu. Oleh karena itu, Pesantren dikonseptualisasikan sebagai institusi di mana individu berkumpul untuk terlibat dalam belajar pengetahuan Islam. Seringkali, istilah “pesantren” ditambah dengan penambahan “pondok,” yang membedakannya dari bentuk pondok lainnya. Oleh karena itu, nama pesantren menandakan tempat berkumpul bagi individu yang ingin mempelajari ajaran Islam. Hielmy (1999) menggambarkan berbagai pesantren berdasarkan karakteristiknya, termasuk pesantren salafi, model klasik atau tradisional, dan lain lain (Arwani and Masrur, 2022).

Mustajab (2015) menyebutkan pondok pesantren di Indonesia, sudah mulai mengimplementasikan bidang pendidikan keterampilan, sehingga santri pondok tidak semata belajar pendidikan umum dan agama Islam, namun belajar keterampilan yang saat ini dibutuhkan (Najihah 2022). Pesantren berdiri untuk memenuhi tuntutan zaman. Bahkan eksistensi pesantren sejak pra kemerdekaan Indonesia sudah banyak berkontribusi pada masyarakat Indonesia. Pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai angka ribuan sudah seharusnya memiliki potensi yang besar juga dalam bidang ekonomi. Jika pesantren tidak memberdayakan santrinya di era saat ini, maka lembaga-lembaga ekonomi mikro lain yang akan menggeser ke arah kemajuan (Makki and Subairi, 2020).

Konsep Ekonomi Pesantren

Pesantren merupakan institusi yang melekat dan secara fundamental terintegrasi dalam kerangka sosial masyarakat Muslim Indonesia. Peran sosial yang dilakukan oleh pesantren ini terus bertahan dan secara signifikan memperkaya kehidupan komunitas Muslim. Aset yang dimiliki oleh pesantren merupakan modal sosial yang tangguh yang memungkinkan mereka untuk memenuhi tanggung jawab

4. Pesantren membangun unit-unit usaha yang bersifat produktif, guna menunjang kemandirian ekonomi institusi dan pemberdayaan masyarakat
5. Pesantren mengorganisir alumni yang telah memiliki usaha untuk menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan ekonomi umat dan masyarakat luas.
6. Pesantren menanggapi dinamika ekonomi global dengan mengadopsi model bisnis daring, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai strategi adaptif dalam pengembangan usaha.

Daftar Pustaka

- Amin, Arif rahman Nurul, and Maya Panorama. 2021. "Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Jurnal Syntax Transformation* 2 (07): 895-914. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i7.321>.
- Arwani, Agus, and Muhamad Masrur. 2022. "Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pondok Pesantren." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 2755. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6001>.
- Azizah, Siti Nur, and Yeny Fitriyani. 2018. "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal: Studi Kasus Ponpes Sidogiri." In . Vol. 1.
- Bakhri, Saiful. 2019. "PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT MELALUI PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN" 07 (01).
- Basit, Abdul, and Tika Widiastuti. 2019. "Model Pemberdayaan Dan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Mamba'us Sholihin Gresik" 6 (4).
- Budimansyah, and Diah Mukminatul Hasyimi. 2024. "PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PONDOK PESANTREN MELALUI PROGRAM SANTRIPRENEUR DI PONDOK PESANTREN" 08 (04).
- Chamidi, Achmad Luthfi. 2023. "Peran Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dalam Mendorong Kemandirian Ekonomi (Studi Kasus Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2): 3079. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8713>.
- Ghufron, Moh. Idil, and Kholid Ishomuddin. 2021. "Konsep Pengembangan Ekonomi Pesantren Dan Pengendalian Pola Perilaku Konsumtif Santri Di Pondok Pesantren Nurul Jadid." *KOSMARA*.
- Karyono. 2023. "Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Subang Jawa Barat (Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 45)."

- Rayah Al-Islam 7 (3): 1779–91.
<https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.901>.
- Makki, Mustaqim, and H Subairi. 2020. “Peningkatan Ekonomi Pesantren Melalui Budidaya Vanili Dengan Sistem Agrikultur Di Kabupaten Bondowoso.” *Ekonomi Dan Bisnis* 6 (1): 2599–3348.
- Misbah, Ahmad. 2021. “Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pesantren” 5.
- Najihah, Ainun. 2022. “PENINGKATAN EKONOMI PESANTREN MELALUI PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UMKM) TOKO KITAB (Studi Pondok Pesantren Sunan Darajat Banjarwati-Paciran-Lamongan)” 02 (02): 10–16. <https://doi.org/10.55352>.
- Nasrullah, Ahmad Amir Aziz, Baiq El Badriati, and Titik Husnawati Amini. 2024. “Model Pengembangan Manajemen Ekonomi Pesantren Pada Unit-Unit Usaha Di Pondok Pesantren Salaf Modern Thohir Yasin.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan* 8 (1): 321.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v8i1.25298>.
- Nurul Komariyah, and Alan Su’ud Ma’adi. 2024. “Model Pengelolaan Ekonomi Pesantren Dalam Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Di Pondok Pesantren Tanwirul Islam Sampang.” *Maslahah : Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2 (4): 131–46.
<https://doi.org/10.59059/maslahah.v2i4.1681>.
- Rohman, Abdur, and Hotijeh. 2023. “ANALISIS MANAJEMEN KOPERASI PONDOK PESANTREN NAZHATUT THULLAB BERBASIS EKOPROTEKSI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.” *Edunomika* 8 (1): 2023.
- Saleh, Muhammad, I Nyoman Budiono, and Nidaul Islam. 2019. “Manajemen Kewirausahaan Koperasi Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqaa.” *Balanca* 1 (1).
- Sinta, Vovi, Lailatul Fitriyah, Nuri Liana Sari, and Sinta Budi Kusuma. 2024. “PENGEMBANGAN EKONOMI PESANTREN BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus Industri Pupuk Kandang Alumni Ponpes Nurul Huda Sukaraja).” *Equilibrium* 21 (2): 132–42.
<https://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>.

Siregar, Isropil, Marwazi, Abdul Halim, and Rita Sahara Munte. 2024. "Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2021" 7.

Yaqin, Ainol, and Roisul Muhtadin. n.d. "Strategi Membangun Ekonomi Pesantren Melalui Sentralisasi Kebutuhan Fashion Pada Industri Konveksi Pondok Pesantren Nurul Jadid."

PROFIL PENULIS



Siti Masruroh, M.E.


Pada tahun 2018 berhasil lulus dengan Predikat Cumlaude dan melanjutkan kuliah magister pada tahun 2019 di kampus yang sama yakni di Universitas Islam Indonesia jurusan Magister Ilmu Agama Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Dan berhasil menyelesaikan studi magister Ekonomi Islam pada tahun 2021. Penulis pada tahun 2022 memulai bekerja di salah satu kampus swasta di Kediri. Yaitu di Institut Agama Islam Badrus Sholeh. Penulis menjadi dosen tetap prodi Ekonomi Syariah di kampus swasta tersebut. Penulis berusaha aktif di bidang kepenulisan dan menulis jurnal. Penulis berusaha aktif dengan menulis buku-buku atau jurnal yang berkaitan dengan Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Oleh sebab itu, penulis terus berupaya dalam meningkatkan kompetensi melalui pelatihan, publikasi ilmiah, keterlibatan dalam forum akademik, serta bidang ekonomi syariah lainnya. Dan untuk mewujudkan karir menjadi dosen profesional, maka penulis saat ini berusaha aktif dalam kepenulisan termasuk membuat buku ini. Harapannya dengan aktif menulis, semoga dapat memberikan manfaat dan sumbangsih positif untuk bangsa dan negara.

Email Penulis: masruroh047@gmail.com



BAB 13
PEMASARAN PRODUK
LOKAL DALAM
GERAKAN *SLOW FOOD*

Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.
Institut Teknologi Bandung



pangan lokal terhadap tekanan pasar global. Komitmen *slow food* terhadap keberlanjutan melampaui isu lingkungan semata, mencakup pula dimensi sosial dan ekonomi dari produksi pangan, serta mendorong transparansi dan keterlacakan dalam rantai pasok pangan. Lebih jauh lagi, gerakan ini mengakui keterkaitan intrinsik antara pangan dan budaya, dan karena itu mendorong pelestarian warisan kuliner serta pendidikan pangan guna memberdayakan konsumen agar mampu membuat pilihan pangan yang sadar dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, gerakan *slow food* juga terhubung dengan meningkatnya perhatian global terhadap kedaulatan pangan, yaitu hak komunitas untuk menentukan sendiri sistem pangan dan pertaniannya, dengan mengutamakan kebutuhan produsen dan konsumen lokal dibandingkan tuntutan pasar global (Ningrum & Subroto, 2020). Kedaulatan pangan mendorong kebijakan yang mendukung pertanian keluarga, mempromosikan praktik agroekologi, dan melindungi budaya pangan lokal dari ancaman penyeragaman akibat globalisasi (Akanmu et al., 2023).

Bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang sesuai bagi produk lokal dalam kerangka gerakan *slow food* yang mengedepankan prinsip *good, clean, and fair*. Juga menjelaskan peran sinergis antara komunitas, teknologi digital, dan narasi budaya dalam membangun pemasaran berbasis nilai yang berkelanjutan. Tujuan lainnya adalah menggambarkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya dari pemasaran produk lokal yang dilakukan melalui pendekatan *Slow food*, termasuk kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan pelestarian identitas kuliner lokal.

Konsep *Slow food* dan Tantangan Produk Lokal

Edukasi yang komprehensif bagi konsumen dan produsen memegang peranan penting dalam menanamkan pemahaman mendalam dan apresiasi terhadap nilai-nilai yang diusung oleh gerakan *slow food* (Hendriks & Lagendijk, 2020). Pemahaman konsumen mengenai dampak pilihan makanan mereka terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan budaya merupakan fondasi penting dalam mendorong perubahan perilaku konsumsi (Augtiah et al., 2022).

(Komara et al., 2021). Peningkatan jumlah usaha kuliner di Indonesia, yang didukung oleh inisiatif pemerintah seperti Program Pemberdayaan UMKM, menunjukkan pentingnya sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini menuntut strategi pemasaran yang strategis, dengan fokus pada keunikan produk, unsur artistik, detail kerajinan, kedekatan dengan bahan baku, lokasi strategis, ketersediaan tenaga kerja, kreativitas, serta kepekaan terhadap preferensi pasar (Samrin et al., 2021). Selain itu, pengembangan usaha alternatif melalui peningkatan strategi pemasaran, layanan wisata dan edukasi, serta optimalisasi platform media sosial dan *e-commerce* sangat penting untuk memanfaatkan kekayaan warisan kuliner Indonesia (Mustaniroh et al., 2020).

Kesimpulan

Gerakan *slow food* menawarkan pendekatan alternatif yang holistik dalam memasarkan produk lokal dengan menekankan pada keberlanjutan, keadilan, dan pelestarian budaya. Strategi pemasaran produk lokal dalam kerangka ini tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara edukasi konsumen, penggunaan media digital, keterlibatan komunitas, dan penguatan narasi budaya. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat posisi produk lokal di tengah arus globalisasi, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang tangguh dan adil.

Upaya ini melibatkan kolaborasi antara produsen, komunitas, dan *influencer* yang berintegritas, sehingga nilai-nilai lokal dapat dikomunikasikan secara efektif kepada pasar yang lebih luas. Acara *slow food* secara luring, pemasaran berbasis komunitas, serta platform digital menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesadaran konsumen dan memperkuat loyalitas terhadap produk lokal.

Dengan penerapan strategi yang tepat, produk lokal tidak hanya menjadi pilihan etis dan berkelanjutan bagi konsumen, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pelestarian identitas kuliner bangsa. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasaran produk lokal berbasis nilai-nilai *slow food* sangat relevan untuk menjawab tantangan keberlanjutan pangan di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abyan, M. F. (2020). *PERAN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM HARVEST CAKE DALAM MENINGKATKAN BRAND AWARENESS PADA TRANSISI SEGMENTASI PASAR GENERASI X MENUJU MILENIAL MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK BARU BLACKCHEESECAKE*. <https://repository.bakrie.ac.id/3583/>
- Akanmu, A. O., Akol, A. M., Ndolo, D. O., Kutu, F. R., & Babalola, O. O. (2023). Agroecological techniques: adoption of safe and sustainable agricultural practices among the smallholder farmers in Africa. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7. <https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1143061>
- Alfajri, M. F., Adhiazni, V., & Aini, Q. (2019). PEMANFAATAN SOCIAL MEDIA ANALYTICS PADA INSTAGRAM DALAM PENINGKATAN. *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 34. <https://doi.org/10.14710/interaksi.8.1.34-42>
- Arfan, R., Maufira, R., & Akbar, I. (2023). The Strategy of BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh Branch in the Socialization of the Non-wage Recipient Program. *Telaah Bisnis*, 23(2), 144. <https://doi.org/10.35917/tb.v23i2.321>
- Aripradono, H. W. (2020). Penerapan Komunikasi Digital Storytelling Pada Media Sosial Instagram. *Indonesian Institute of Information Technology*, 9(2), 121–128. <https://doi.org/10.34148/teknika.v9i2.298>
- Armawan, I., & Sudarmiatin, S. (2021). Marketing Strategy of Local Wisdom SMEs Roti Durian Panglima. *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 1(5), 329–337. <https://doi.org/10.36418/edv.v1i5.48>
- Arumsari, R. Y., & Utama, J. (2018). KAJIAN PENDEKATAN VISUAL IKLAN PADA INSTAGRAM. *Jurnal Bahasa Rupa*, 2(1), 52–58. <https://doi.org/10.31598/bahasarupa.v2i1.230>
- Atrinawati, R. A. (2021). Javanese Culture Maintenance by Utilizing Natural Resources for Traditional Cuisine to Promote Tegal City Culinary Tourism. *E3S Web of Conferences*, 317, 1016. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701016>
- Atthahara, H., Nayiroh, L., & Saputro, N. W. (2022). PEMBINAAN

- PEMBUATAN PUPUK ORGANIK PADA KELOMPOK WANITA TANI SEBAGAI PENINGKATAN PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI (P2L) DI DESA RAWAGEMPOL WETAN. *Jurnal Abditani*, 5(1), 60–63. <https://doi.org/10.31970/abditani.v5i1.144>
- Augtiah, I., Susila, I., & Wiyadi. (2022). Pengaruh Green Product, Green Advertising, Dan Green Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Dengan Consumer Attitude Sebagai Variabel Mediasi. *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 10–26. <https://doi.org/10.23917/benefit.v7i2.1486>
- Bianco, M. (2021). Evolution and Future Development of the Food Experience for Made in Italy and Japanese Products. In *Ca' Foscari Japanese Studies/Ca' Foscari Japanese studies*. Edizioni Ca' Foscari. <https://doi.org/10.30687/978-88-6969-559-9/005>
- Çelebi, D., & Genç, S. (2021). Exploring the *Slow food* Perception of Gastronomy and Culinary Arts Students. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 9(1), 99–110. <https://doi.org/10.21325/jotags.2021.779>
- Chen, Y., Qin, Z., Yan, Y., & Yi, H. (2024). The Power of *Influencers*: How Does *Influencer* Marketing Shape Consumers' Purchase Intentions? *Sustainability*, 16(13), 5471. <https://doi.org/10.3390/su16135471>
- Darmawan, A., Moussadecq, A., Rohiman, R., & Kurniawan, H. (2022). PELATIHAN BRANDING PRODUK UMKM BAGI WARGA KELURAHAN MULYO JATI KOTA METRO. *Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 25–31. <https://doi.org/10.30873/jppm.v4i01.3155>
- Dias, P., & Cavalheiro, R. (2021). The role of storytelling in the creation of brand love: the PANDORA case. *Journal of Brand Management*, 29(1), 58–71. <https://doi.org/10.1057/s41262-021-00254-6>
- El-Sayed, S., & Cloutier, S. (2022). Weaving disciplines to conceptualize a regenerative food system. *Journal of Agriculture Food Systems and Community Development*, 1–29. <https://doi.org/10.5304/jafscd.2022.112.003>
- Ewert, F., Baatz, R., & Finger, R. (2023). Agroecology for a Sustainable Agriculture and Food System: From Local Solutions to Large-Scale Adoption. *Annual Review of Resource Economics*, 15(1), 351–381. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-102422->

090105

- Fadillah, A., & Indrawan, D. (2020). IoT Business Model Development for Food Safety Monitoring System in the Poultry Slaughterhouse. *IOP Conference Series Materials Science and Engineering*, 874(1), 12022. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/874/1/012022>
- FITRIAMI, E., & Galaresa, A. V. (2021). Edukasi Pencegahan Stunting Berbasis Aplikasi Android Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Ibu. *Citra Delima Scientific Journal of Citra Internasional Institute*, 5(2), 78–85. <https://doi.org/10.33862/citradelima.v5i2.258>
- Gasparin, M., Quinn, M., Green, W., Saren, M., & Conway, S. (2022). Stories of value: Business model innovation adding value propositions articulated by Slow Storytelling. *Journal of Business Research*, 149, 101–111. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.04.069>
- Haoe, S., Ganiwidjaja, J. T., & Andreani, F. (2023). PERAN MARKETING FOOD *INFLUENCER* TIKTOK TERHADAP FOLLOWER ENGAGEMENT DAN PURCHASE INTENTION PARA PENGIKUT FEBRYAN DIO RAMADHAN. *Jurnal Manajemen Perhotelan*, 9(1), 24–34. <https://doi.org/10.9744/jmp.9.1.24-34>
- Haro, A., Waspodo, A. A., Lestari, F. A., & Cindy. (2020). Marketing Strategy of Local Products through Social Media in Segara Jaya Village. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)*, 4(2), 161–170. <https://doi.org/10.21009/jpmm.004.2.01>
- Hartanti, M., Nurviana, N., & Lukman, C. C. (2020). The Development of Tools for Designing the Local Characteristic Food Packaging Based on Digital Applications as an Attempt to Accelerate Education. *Proceedings of the 3rd International Conference on Learning Innovation and Quality Education (ICLIQE 2019)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200129.065>
- Hendriks, B., & Lagendijk, A. (2020). *Slow food* as one in many a semiotic network approach to the geographical development of a social movement. *Environment and Planning E Nature and Space*, 5(1), 169–188. <https://doi.org/10.1177/2514848620970923>
- Huang, H. (2023). *Research on the Importance of Cross-cultural Integration in International Business Management*. 4(6), 171.

<https://doi.org/10.32629/memf.v4i6.1502>

- Ikhwana, A., Kurniawati, R., Kurniawan, W., & Alinda, F. (2019). Identification of supporting factors of local food products towards the global market competition. *Journal of Physics Conference Series*, 1402(2), 22035. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/2/022035>
- Kaur, A., Singh, G., Kukreja, V., Sharma, S., Singh, S., & Yoon, B. (2022). Adaptation of IoT with Blockchain in Food Supply Chain Management: An Analysis-Based Review in Development, Benefits and Potential Applications. In *Sensors* (Vol. 22, Issue 21, p. 8174). Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/s22218174>
- Kim, J. H., Bae, K.-T., & Hong, J. Y. (2019). *Consumption Value System and Storytelling for Digital Advertising*. 1–4. <https://doi.org/10.1145/3326467.3326494>
- Komara, B. D., Maghfiroh, L., Setiawan, H. C. B., & Kurniawan, A. (2021). Village Community Business in Maintaining Traditional Food “Opak Ladu” Based in Creative Economics. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research/Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211020.055>
- Kurnianingsih, R., Sukenti, K., Sukiman, S., & Julisaniah, N. I. (2021). Diversifikasi Pengolahan Kacang Lokal Lombok Menjadi Pangan Fungsional Di Desa Ubung Lombok Tengah. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(4), 285–289. <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v4i4.1104>
- Kusumawati, A., & Tiarawati, M. (2022). PENGARUH GREEN PERCEIVED RISK DAN GREEN PACKAGING TERHADAP GREEN PURCHASE INTENTION PADA PRODUK SKINCARE AVOSKIN. *SIBATIK JOURNAL Jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi Budaya Teknologi Dan Pendidikan*, 1(10), 2071–2084. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i10.305>
- Laksono, Y. T. (2023). ANALISIS BRAND COMMUNICATION SEBAGAI PENINGKATAN LOCAL PRODUCT PLACEMENT OLEH CREATIVEDIA. *Sintesa*, 2(2), 93–112. <https://doi.org/10.30996/sintesa.v2i02.8686>
- Lavorato, D., & Piedepalumbo, P. (2023). How Smart Technologies

- Affect the Decision-Making and Control System of Food and Beverage Companies—A Case Study. *Sustainability*, 15(5), 4292. <https://doi.org/10.3390/su15054292>
- Maász, C., Kroll, L., & Lingenfelder, M. (2024). Requirements of Environmentally-Aware Consumers on the Implementation and Communication of Sustainability Measures in the Beverage Industry: A Qualitative Kano-Model Approach. *Journal of Food Products Marketing*, 30(4), 118–133. <https://doi.org/10.1080/10454446.2024.2351844>
- Melović, B., Ćirović, D., Backović, T., Dudić, B., & Gubíniová, K. (2020). Attracting Green Consumers as a Basis for Creating Sustainable Marketing Strategy on the Organic Market—Relevance for Sustainable Agriculture Business Development. *Foods*, 9(11), 1552. <https://doi.org/10.3390/foods9111552>
- Mercius, M., & Utami, L. S. S. (2023). Pengaruh Konten Instagram @ridistaonline terhadap Minat Beli Konsumen. *Kiwari*, 2(1), 83–90. <https://doi.org/10.24912/ki.v2i1.23058>
- Migkos, S. P., Giannakopoulos, N. T., & Σακάς, Δ. Π. (2025). *Impact of Influencer Marketing on Consumer Behavior and Online Shopping Preferences*. <https://doi.org/10.20944/preprints202504.0787.v1>
- Mustaniroh, S. A., Prabaningtiyas, N., & Citraresmi, A. D. P. (2020). Analysis of Business Development Strategies with Business Model Canvas Approach. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 515(1), 12075. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/515/1/012075>
- Natakoesoemah, S. (2020). Pendekatan Komunikasi Partisipatif sebagai Model Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) JAPFA4Kids. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(3), 247. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3206>
- Nawarathna, D., & Arachchi, R. S. S. W. (2021). A Study on Sustainable Event Management Practices in Sri Lanka; Event Managers' Perspective. *Tourism and Sustainable Development Review*, 2(1), 49–64. <https://doi.org/10.31098/tsdr.v2i1.40>
- Niandari, N., & Handayani, H. (2023). *GREEN ACCOUNTING, KINERJA LINGKUNGAN, DAN PROFITABILITAS*. 16(1). <https://doi.org/10.30813/jab.v16i1.3875>

- Ningrum, V., & Subroto, A. (2020). Do the state and market affect the farmer's sovereignty? Study of organic agriculture in Indonesia. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 436(1), 12011. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/436/1/012011>
- Nurlaelah, I., Setiawati, I., Handayani, H., Prianto, A., Alifah, N., & Andini, A. (2023). *Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (Bokashi) Berbasis Teknologi Fermentasi Memanfaatkan Mikroorganisme Efektif Pada Masyarakat Petani di Desa Kananga Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan*. 3(2), 199–204. <https://doi.org/10.52436/1.jpmp.949>
- Pandey, V. K., Dar, A. H., Rohilla, S., Mahanta, C. L., Shams, R., Khan, S. A., & Singh, R. (2023). Recent Insights on the Role of Various Food Processing Operations Towards the Development of Sustainable Food Systems. In *Circular Economy and Sustainability* (Vol. 3, Issue 3, pp. 1491–1514). Springer Nature. <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00248-9>
- Priselie, A. E., & Paramita, S. (2022). Strategi Komunikasi Digital *Influencer* dalam Menggunakan Media Sosial Instagram sebagai Media Fundraising. *Prologia*, 6(1), 163. <https://doi.org/10.24912/pr.v6i1.10375>
- Putra, Y. S., & Pratama, S. A. (2022). PENGEMBANGAN PRODUCT AWARENESS DAN PEMASARAN DIGITAL PADA UMKM ENTING-ENTING GEPUK “CAP DUA POHON KELAPA” SALATIGA. *ABDI MAKARTI*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.52353/abdimakarti.v1i1.267>
- Putri, A. A., & Prayoga, D. (2021). *Pemasaran Sosial menggunakan Media Sosial dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19: Tinjauan Literatur*. 20(2), 144–149. <https://doi.org/10.14710/mkmi.20.2.144-149>
- Putri, N. A., Sahiroh, E., Ramadhanty, N., Wicaksono, M. A., Wardhani, R. K., Kusumaningrum, M., Agung, S., Wahyudi, R., Widyaningtyas, A., Arumki, M. F., L.D, M. G., & Anggi, M. (2022). Pelatihan Branding dan Inovasi Produk Olahan Tempe di Desa Ngroto Grobogan. *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 20–22. <https://doi.org/10.26714/jipmi.v1i1.18>
- Putri, S. T. O., & Sulaeman, E. (2022). *Pengaruh Digital Marketing dan Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Coffe Shop pada Kedai Kopi Anaqi Di Kabupaten Subang*. 7(2), 906.

<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i2.564>

- Qu, B., Xiao, Z., Upadhyay, A., & Luo, Y. (2024). Perspectives on sustainable food production system: Characteristics and green technologies. *Journal of Agriculture and Food Research*, 15, 100988. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.100988>
- Ramdhani, M. D., & Masnita, Y. (2023). PERAN PEMASARAN MEDIA SOSIAL PADA EKUITAS MEREK MENGGUNAKAN CITRA DAN KEPERCAYAAN MEREK. *Jurnal Ekobis Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 89–103. <https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.701>
- Sakti, H., Rusmawati, D., & Alfaruqy, M. Z. (2023). PENGUATAN GENERASI ANTI-STUNTING DI KOTA SEMARANG. *Reswara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 857–864. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2544>
- Samrin, Hasibuan, H. A., Hidayat, R., & Rusiadi, R. (2021). Formulation Of Blue Ocean Strategy Developing A Bamboo Small Business In Binjai City. *International Journal Of Science Technology & Management*, 2(5), 1644–1651. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i5.319>
- Santos, A. R., Ortiz, A. F., Fronda, J. G., Galano, J. A., & Savellano, J. N. (2024). Effective Approaches to Enhance Social Media Marketing for Philippine Small Enterprises. *International Review of Management and Marketing*, 14(5), 205–215. <https://doi.org/10.32479/irmm.16773>
- Setiawan, A. I., Hendraningsih, A. P., Rahayu, S., & Dewi, A. S. (2022). The Role of Digital Marketing Interventions in E-Advocacy Leverage Capacity: A Culinary Business Breakthrough to Counter the COVID-19 Pandemic. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(2), 201–216. <https://doi.org/10.22146/jieb.v37i2.3995>
- Siswanto, Y., Lubis, Z., & Akoeb, E. N. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Kelapa Sawit Rakyat di Desa Tebing Linggahara Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.31289/agrisains.v2i1.255>
- Stein, A. J., & Santini, F. (2021). The sustainability of “local” food: a review for policy-makers. In *Review of Agricultural Food and Environmental Studies* (Vol. 103, Issue 1, pp. 77–89). Springer

- Science+Business Media. <https://doi.org/10.1007/s41130-021-00148-w>
- Syukri, A. U., & Sunrawali, A. N. (2022). Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. *KINERJA*, 19(1), 170–182. <https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10207>
- Türkkan, C. (2022). DIFFERENT FORMS OF EMBEDDEDNESS AT ISTANBUL'S BAZAAR AND FARMERS MARKET. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi/Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 25(2), 235–253. <https://doi.org/10.18490/sosars.1111362>
- Vieira, L. C., Serrao-Neumann, S., & Howes, M. (2020). *Alternative food networks and opportunities for transformation towards a sustainable and resilient urban food system*. <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2019-12/apo-nid306549.pdf>
- Vukmirović, V., Kostić-Stanković, M., & Domazet, I. (2020). Influencers as a segment of digital marketing communication: Generation Y attitudes. *Marketing*, 51(2), 98–107. <https://doi.org/10.5937/markt2002098v>
- Wagner, M., Chen, Y., Curteza, A., Thomassey, S., Perwuelz, A., & Zeng, X. (2017). Fashion design solutions for environmentally conscious consumers. *IOP Conference Series Materials Science and Engineering*, 254, 192017. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/254/19/192017>
- Wijianto, W., Galenso, N., Sahid, R., Subchan, D., Hasan, S. M., Riyanto, E., Mangemba, D., & Aswati, A. (2022). Pelatihan Pembuatan Makanan Tambahan Lokal untuk Pencegahan Stunting. *Poltekita Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 93–99. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i1.718>
- Wulandari, I. S., & Wulandari, D. R. (2023). Peran User Generated Content Produk Mitochiba. *REPRESENTAMEN*, 9(1), 98–112. <https://doi.org/10.30996/representamen.v9i01.8385>
- Xu, S. (2024). Research on marketing strategies in the pet food industry: A case study based on existing brands. *SHS Web of Conferences*, 207, 1002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202420701002>
- Yuliani, S., Humsona, R., & Pranawa, S. (2020). *Stakeholder Analysis in Community-Based Ecotourism Development in Gedong Pass*.

- <https://doi.org/10.2991/icstcsd-19.2020.27>
- Yuniar, A. D., Ainurriszqi, A. F., Tresnayanti, A. F., Rahma, A. F., Amalia, R., Zulaikha, S. N., & Fibrianto, A. S. (2020). *Analysis of Glocalization Phenomena: Advertising of Starbucks Special Edition Products with Indonesian Local Wisdom in Social Media*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200214.045>
- Abror, F., & Khuljana, D. (2022). Upaya Merealisasikan Good Governance melalui Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 55–59. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i1.381>
- Accastello, C., Cocuccioni, S., & Teich, M. (2022). The Concept of Risk and Natural Hazards. In *IntechOpen eBooks*. IntechOpen. <https://doi.org/10.5772/intechopen.99503>
- Afriany, J., & Hakim, A. (2021). *Pengaruh Terhadap Financial Literacy, Resiko Toleransi, Kemampuan Manajemen Resiko Dalam Keputusan Investasi*. 2(2), 170–176. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v2i2.660>
- Arifin, Z., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). *Digital Governance: Studi Kasus Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu di Kabupaten Serang*. 5(1), 1105–1123. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v5i1.31861>
- Aula, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Resiliensi Organisasi: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 11(1). <https://doi.org/10.12962/j23373520.v11i1.67483>
- Budiasni, N. W. N., & Ayuni, N. M. S. (2020). Transparency and Accountability Based on The Concept of “Pada Gelahang” Enhancing Village Financial Management. *International Journal of Social Science and Business*, 4(3), 501. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i3.28416>
- Dewi, S. (2020). *PROSES KONTRUKSI PENGETAHUAN SISWA DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT PADA PELAJARAN MATEMATIKA DI SMA NEGERI 8 KOTA JAMBI*. 4(1), 55. <https://doi.org/10.33087/phi.v4i1.87>
- Elhaq, M. K., Solehudin, A., & Juardi, D. (2021). Penerapan The Dude

- Sebagai Sistem Monitoring dengan Notifikasi Otomatis Melalui Email, Telegram dan SMS. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 3380. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i7.3640>
- Fahrudi, M. A., & Suartana, I. M. (2023). Integrasi End-point Security Berbasis Agent dan Bot Messenger untuk Deteksi dan Monitoring Serangan pada Web Server secara Real-time. *Journal of Informatics and Computer Science (JINACS)*, 275–282. <https://doi.org/10.26740/jinacs.v4n03.p275-282>
- Fauzi, R., & Lubis, M. (2021). Assessment Framework for Defining the Maturity of Information Technology within Enterprise Risk Management (ERM). *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 12(10). <https://doi.org/10.14569/ijacsa.2021.0121075>
- Gani, A. S. A., Salim, B., & Udin, N. M. (2020). The Implementation of Risk Management in Malaysian Public Sector to Sustain Federal Government's Revenue. *International Journal of Accounting Finance and Risk Management*, 5(2), 76. <https://doi.org/10.11648/j.ijafmr.20200502.12>
- Hải, N. X., Huy, D. T. N., Nuong, L. N., Diep, N. T., & Thang, T. D. (2023). Further Analysis on Risk Management and Solutions to Improve Productivity and Safety in Construction Sector - and Environment Protection Law in Construction Activities. *Scholars Journal of Economics Business and Management*, 10(7), 156–164. <https://doi.org/10.36347/sjebm.2023.v10i07.002>
- Hakim, L., Adiarsa, S. R., & Ema, E. (2022). Improving Institutional Capacity Towards Digital-Based Governance. *Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat Sains (JIMAS-Sains)*, 1(1), 19. <https://doi.org/10.33474/jimas-sains.v1i1.15952>
- Haryadi, E., Yuliandari, D., Abdussomad, A., Wijayanti, D., Amelia, M., & Syafrianto, S. (2021). Maintaining The Continuity of The Company's Operation using the NIST Framework for SME. *Jurnal Teknik Komputer*, 7(1), 74–78. <https://doi.org/10.31294/jtk.v7i1.9486>
- Herdiana, Y., Munawar, Z., & Putri, N. I. (2021). Mitigasi Ancaman Resiko Keamanan Siber Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal ICT Information Communication & Technology*, 20(1), 42–52. <https://doi.org/10.36054/jict-ikmi.v20i1.305>

- Kenpurwastuti, N., Setiadjit, D. G., & Vitasari, P. (2020). Pengaruh Variabel Pemahaman K3 dan Kepatuhan K3 terhadap target Zero Accident. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri*, 6(1), 6–11. <https://doi.org/10.36040/jtmi.v6i1.2623>
- Kurniawan, B. (2020). Evaluasi Program Konservasi Cagar Budaya melalui Mekanisme Pemberian Subsidi di Kawasan Kota Lama Sawahlunto. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya*, 14(1), 38–59. <https://doi.org/10.33374/jurnalkonservasicagarbudaya.v14i1.200>
- Kusumawardani, M., Soediro, A., Adhitama, F., & Farhan, M. (2023). Efektivitas Corporate Governance dan Fraudulent Financial Reporting. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1301. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p11>
- Maimunah, M., Fahrurazi, F., Dupni, D., & Maisah, M. (2021). MANAJEMEN STRATEGIK & ANALISIS SWOT UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI PROPINSI RIAU. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 195–204. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i2.390>
- Nalurita, W., & Sari, R. D. A. K. (2023). *PERKEMBANGAN TEORI MANAJEMEN*. 6(1). <https://doi.org/10.62826/muara.v6i1.68>
- Naude, M. J., & Naude, R. T. (2022). A proposed risk framework as a tool for sustainability for the South African wine industry. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 25(1). <https://doi.org/10.4102/sajems.v25i1.4235>
- Novia, S., Haris, A., & Darmayanti, N. (2022). Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja terhadap Stres Kerja Karyawan PT. PLN (Persero) Pembangkitan Selama Masa Pandemi Covid – 19. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 123–134. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1143>
- Ostapenko, M., & Kholboeva, U. (2021). Analysis of the Effectiveness of Quality Management Tools Aimed at Risk-Management of Organizations. *MATEC Web of Conferences*, 346, 3054. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202134603054>
- Putri, N. S., & Widjaja, I. (2022). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), dan Non-Performing Loan (NPL) terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017-

2019. *Tarumanagara University*, 6(3), 295. <https://doi.org/10.24912/jmbk.v6i3.18662>
- Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Rufaidah, A., & Hasib, F. F. (2022). Risk-Based Bank Rating: Studi Multi Kasus pada Perbankan Syariah. *JIHBIZ Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 15–26. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.1039>
- Rohmaniyah, R. T., & Cecep, C. (2023). PANDANGAN ISLAM TERHADAP MANAJEMEN RISIKO MELALUI TELADAN KISAH NABI YUSUF AS. *BASHA IR JURNAL STUDI AL-QUR AN DAN TAFSIR*, 17–22. <https://doi.org/10.47498/bashair.v3i1.989>
- Rozie, A. F. (2022). ANALISIS KESELAMATAN DAN KELAYAKAN PENGGUNAAN CNG BUFFER STORAGE TANK BERBASIS METODE RESIDUAL LIFE ASSESSMENT. *AME (Aplikasi Mekanika Dan Energi) Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 8(1), 48. <https://doi.org/10.32832/ame.v8i1.6194>
- Saputra, L. A., Akbar, F. M., Cahyaningtias, F., Ningrum, M. P., & Fauzi, A. (2023). Ancaman Keamanan Pada Sistem Informasi Manajemen Perusahaan. *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, 1(2), 58–66. <https://doi.org/10.38035/jpsn.v1i2.48>
- Seno, R. H. (2020). Strategi Reformasi Administrasi dan Kepemimpinan Strategies Admisnistrative Reforms and Leadership. *Reformasi Administrasi*, 7(2), 113–122. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v7i2.1061>
- Sitanggang, P. A., & Sitanggang, F. A. (2022). Analisis Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan SNI ISO 31000:2018 (Studi Kasus: Sparepart Personal Computer Second Jambi). *Eksis Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 12. <https://doi.org/10.33087/eksis.v13i1.293>
- Tanaamah, A. R., Wijaya, A. F., & Maylinda, S. A. (2021). Tata Kelola Teknologi Informasi Pada Sektor Publik: Penyelarasan Teknologi Informasi Dengan Visi Kepemimpinan (Studi Kasus: Kota Salatiga dan Kabupaten Bengkulu). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 8(6), 1319. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2021865379>
- Thantawi, T. R., Anwar, M., Mursyidah, A., Khoiri, A. A., & Hidayatullah, T. (2022). MINIMALISASI POTENSI RISIKO STRATEGIS PADA MERGER BANK UMUM SYARIAH ANTARA BANK SYARIAH

- MANDIRI (BSM), BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH (BNIS), DAN BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH (BRIS). *SAHID BANKING JOURNAL*, 2(1), 21–34. <https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.65>
- Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah*. 8(4), 649–660. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i4.297>
- Wahyudi, F., & Utomo, L. T. (2021). Perancangan Security Network Intrusion Prevention System Pada PDTI Universitas Islam Raden Rahmat Malang. *EDUMATIC Jurnal Pendidikan Informatika*, 5(1), 60–69. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i1.3278>
- Yanuar, D., Muharman, N., Rahmawati, R., Sartika, M., & Oktayuana, Y. A. (2022). Manajemen Krisis Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh Saat Pandemi COVID-19. *Syiah Kuala University*, 11(1), 139–163. <https://doi.org/10.24815/jkg.v11i1.25321>


PROFIL PENULIS



Ir. Pathmi Noerhatini, M.Si., IPP.

Ketertarikan penulis terhadap kewirausahaan dimulai pada tahun 2005 dengan mendirikan perusahaan perseorangan Lyco Farm dan selanjutnya menjadi CV Lyco Farm pada tahun 2023. CV Lyco Farm adalah perusahaan berbasis trading sayuran berkualitas prima ke beberapa supermarket di Bandung dan sekitarnya yaitu Yoga/Griya, Borma dan Papaya. Produk berasal dari kebun swakelola dan dari mitratani. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil kuliah S3 prodi Manajemen Pemasaran, Universitas Pasundan pada tahun 2023. Sebelumnya penulis bersekolah di SMAN 4 Bandung pada tahun 1978, dilanjutkan dengan Studi S1 Agronomi di Institut Pertanian Bogor (IPB) lulus 1985 dan S2 dari IPB lulus 1994. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung (ITB)

Penulis memiliki kepakaran di bidang kewirausahaan, terutama Technopreneurship. Penulis mengajar Kewirausahaan, Sosiologi Industri, Pancasila dan Kewarganegaraan di ITB. Selain sebagai dosen, penulis pun menjadi peneliti di Pusat Pemberdayaan Perdesaan (P2D) ITB, dimana proposal pengabdian masyarakat didanai ITB sejak 2015 sampai sekarang, juga terlibat beberapa proyek pemberdayaan masyarakat dengan dana dari beberapa NGO dari Belanda, Belgia, Amerika Serikat dan JICA (Jepang), juga dari Kementerian Pertanian dan Pemprov Jabar. Penulis juga aktif sebagai instruktur untuk pelatihan pelaku UMKM, termasuk kelompok tani sejak 2002 sampai sekarang. Pada tahun 2012 penulis menjadi juara nasional dan mendapatkan Anugrah Citra Produk Pertanian Berdaya Saing 2012 dari Kementerian Pertanian RI.



BAB 14
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DALAM
EKONOMI KERAKYATAN

Risa Lailatul Majidah, S.E.I.
Universitas Airlangga



Perempuan dan Ekonomi Kerakyatan

Di era globalisasi sekarang, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek yang sangat krusial. Perbedaan biologis antara keduanya memang merupakan bagian dari kodrat alam, namun pola hubungan sosial yang tercipta di antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya dibentuk oleh konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Relasi gender bukan menjadi sesuatu yang tetap dan tak bisa diubah, hal itu dapat dibentuk dan diarahkan menuju kesetaraan dan keharmonisan. Dalam konteks pembangunan kesetaraan dalam pengembangan potensi sumber daya manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan di berbagai bidang. Dengan begitu, adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi sudah tidak lagi bergantung pada persediaan sumber daya alam, melainkan pada strategi pengembangan sumber daya manusia (Da Meisa & Anzari, 2021).

Walaupun bekerja sering dikaitkan dengan gender utamanya laki-laki, namun perempuan banyak terlibat dalam sektor ekonomi rakyat bahkan banyak perempuan menopang ekonomi keluarga. Bahkan untuk tenaga profesional dari tahun ke tahun data perempuan sebagai tenaga profesional semakin naik, terbukti pada tahun 2021 data menunjukkan sebesar 48.65% dan pada 2024 naik sebesar 50,13% tenaga profesional didominasi oleh perempuan (*Perempuan Sebagai Tenaga Profesional - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025*). Hubungan antara perempuan dan ekonomi bersifat multifaset mencakup partisipasi dalam angkatan kerja, kewirausahaan serta dampak kebijakan ekonomi dan pembangunan. Hal ini cocok dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berlaku di Indonesia yang digunakan sebagai sarana bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang merupakan pilar utama demokrasi (Pohan et al., 2018).

Perempuan sangat tepat disandingkan dengan ekonomi kerakyatan karena mereka adalah pelaku utama, pendorong sekaligus penopang dari sistem berbasis rakyat. Peran mereka sangat krusial dalam membangun ekonomi yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi kerakyatan adalah kunci kemajuan sosial dan ekonomi bangsa.

mempertimbangkan kebutuhan dan realitas perempuan, maka hal ini memperkuat ketimpangan dan menghambat partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi.

5. Keterbatasan Akses terhadap Jaringan Pasar atau Teknologi

Perempuan, terutama yang berada di daerah pelosok, menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses teknologi dan jaringan pasar yang krusial untuk kemajuan ekonomi. Tingginya biaya konektivitas internet dan perangkat digital menjadi kendala utama yang menghambat partisipasi perempuan dalam ekonomi digital (Tuncsiper, 2025). Selain itu, rendahnya literasi digital menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan alat digital secara efektif, baik untuk pengembangan pribadi maupun usaha (Mariscal et al., 2019). Hambatan ini semakin diperparah oleh norma sosial dan stereotip gender yang membatasi mobilitas dan kesempatan perempuan dalam mengakses teknologi dan pelatihan.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap jaringan pasar dan pendampingan bisnis juga menghambat pertumbuhan usaha perempuan. Banyak wirausaha perempuan yang kesulitan mendapatkan bimbingan, kemitraan, atau masuk ke jaringan profesional yang dibutuhkan untuk memperluas pasar dan mengembangkan produk. Akibatnya, potensi bisnis mereka sering kali tidak berkembang secara optimal. Membangun lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dan inklusi digital sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor teknologi dan kewirausahaan (AlQubaisi et al., 2024).

Harapan untuk Masa Depan Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan

Pemberdayaan perempuan merupakan kunci dalam menciptakan ekonomi kerakyatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, ekonomi kerakyatan akan berjalan timpang dan kehilangan dampak transformasional yang seharusnya dapat dicapai. Untuk itu, diperlukan dukungan yang setara melalui

perluasan akses terhadap pendidikan, pelatihan, teknologi, jaringan pasar, dan permodalan. Upaya ini penting agar perempuan dapat mengoptimalkan potensi mereka secara mandiri dalam pembangunan ekonomi rakyat yang berkeadilan. Dengan menghapus hambatan struktural dan memperkuat kebijakan yang responsif gender, masa depan ekonomi kerakyatan yang partisipatif dan berkeadilan gender bukan hanya menjadi harapan, tetapi sebuah keniscayaan.

Daftar Pustaka

- Alie, A., & Elanda, Y. (2020). Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>
- AlQubaisi, E., Chopra, A., & Haddad, A. (2024). Qualitative Study on the Barriers to Women's Entrepreneurship in the Tech Industry. In *Studies in Big Data* (Vol. 159, pp. 131–142). https://doi.org/10.1007/978-3-031-71213-5_12
- Arku, C., Odame, H. H., & Arku, F. S. (2011). Seeing through the eyes of clients: The link between microfinance and well-being in rural Ghanaian households. In *Business and Finance: Performance and Management* (pp. 147–164). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84896212922&partnerID=40&md5=a96411d88561c0bad9732b4b2bc7872a>
- Bahaw, P., Stephens, A., & Mack, A. (2025). Gender-sensitive vocational and entrepreneurship education: addressing poverty for Caribbean women. *Discover Global Society*, 3(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00162-z>
- Balasubramanian, P., Ibanez, M., Khan, S., & Sahoo, S. (2024). Does women's economic empowerment promote human development in low- and middle-income countries? A meta-analysis. *World Development*, 178. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106588>
- Boddington, M., & Barakat, S. (2018). Exploring alternative gendered social structures within entrepreneurship education: notes from a women's only enterprise programme in the United Kingdom. In *Women Entrepreneurs and the Myth of "Underperformance": A New Look at Women's Entrepreneurship Research* (pp. 141–158). <https://doi.org/10.4337/9781786434500.00020>
- Da Meisa, E. A., & Anzari, P. P. (2021). Perspektif feminisme dalam kepemimpinan perempuan di Indonesia. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 711–719.

- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079.
- Ergün, Z., Bayram, A. T., & Bayram, G. E. (2024). Challenges and opportunities in rural women's entrepreneurship: Navigating financial, infrastructural, and societal barriers. In *Empowering Women Through Rural Sustainable Development and Entrepreneurship* (pp. 1–14). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-6572-4.ch001>
- Getahun, T. D., & Villanger, E. (2018). Labour-Intensive Jobs for Women and Development: Intra-household Welfare Effects and Its Transmission Channels. *Journal of Development Studies*, 54(7), 1232–1252. <https://doi.org/10.1080/00220388.2017.1327661>
- Harahap, J. (2019). *Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Wanita di Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Labidi, N., & Gtifa, S. (2023). Women's empowerment and leadership: Barriers and perspectives. In *Centering Gender in the Era of Digital and Green Transition: Intersectional Perspectives* (pp. 109–125). https://doi.org/10.1007/978-3-031-38211-6_8
- Lavanya, R., & Mamilla, R. (2024). Empowering women's financial well-being: the role of financial literacy and decision making in wealth creation. *International Journal of Process Management and Benchmarking*, 18(1), 16–35. <https://doi.org/10.1504/IJPMB.2024.140640>
- Manta, A. (2019). Financial inclusion and gender barriers for rural women. *International Journal of Management*, 10(5), 61–72. <https://doi.org/10.34218/IJM.10.5.2019.006>
- Mariscal, J., Mayne, G., Aneja, U., & Sorgner, A. (2019). Bridging the gender digital gap. *Economics*, 13. <https://doi.org/10.5018/economics-ejournal.ja.2019-9>
- Maulina, F., & Listyani, R. H. (2020). Peran Perempuan Anggota Komunitas Pahlawan Ekonomi Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *Paradigma*, 9(1).

- Mitchelmore, S., & Rowley, J. (2013). Entrepreneurial competencies of women entrepreneurs pursuing business growth. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(1), 125–142.
- Mukherjee, S., & Pathak, S. (2023). Promotion of women micro entrepreneurship and the role of NPDAs: Case study from India. In *New Horizons and Global Perspectives in Female Entrepreneurship Research* (pp. 141–179). <https://doi.org/10.1108/978-1-83982-780-820231006>
- Mulliqi, A. (2024). Women-Led Firms and Access to Finance: New Evidence from Transition Economies. *Journal of East-West Business*, 1–34.
- Novalita, & Sarjono, A. (2024). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Lampung. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEKOMBIS)*, 3(2), 16–27. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jekombis/article/view/3468/3214>
- Papadimitriou, A., Mylonas, N., & Frangakis, C. (2024). Investigating women entrepreneurs in creative industries: critical determinants for venture performance. *Creative Industries Journal*, 17(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/17510694.2022.2077575>
- Pereira, E. T., & Manzo, M. (2025). How Does Education Affect the Innovativeness of Female Enterprises? A Literature Overview. In *SIDREA Series in Accounting and Business Administration: Vol. Part F110* (pp. 227–245). https://doi.org/10.1007/978-3-031-78999-1_16
- Perempuan sebagai Tenaga Profesional - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.* (2025). Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>
- Pimpa, N. (2021). Overcoming Gender Gaps in Entrepreneurship Education and Training. *Frontiers in Education*, 6. <https://doi.org/10.3389/feduc.2021.774876>

- Pohan, I. A., Krisdayanti, A. E., & Simanjuntak, D. B. (2018). Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 4(1), 21–31. <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/viewFile/859/562>
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Women and Its Role on Social Welfare Development). *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara*, 3(1), 41–56.
- Rauth Bhardwaj, B. (2014). Impact of education and training on performance of women entrepreneurs: A study in emerging market context. *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies*, 6(1), 38–52. <https://doi.org/10.1108/JEEE-05-2013-0014>
- Risma Klaim Angka Kemiskinan di Surabaya Turun. (n.d.). Retrieved June 1, 2025, from <https://regional.kompas.com/read/2018/07/19/17334051/risma-klaim-angka-kemiskinan-di-surabaya-turun>
- Robinson, S. M. (2011). Women in the labor force: Developments and issues. In *Women in the Labor Force: Developments and Issues*. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84892353872&partnerID=40&md5=aae509b650be438d10e19bacb547424f>
- Rui, G., & Feng-ying, N. (2021). Does empowering women benefit poverty reduction? Evidence from a multi-component program in the Inner Mongolia Autonomous Region of China. *Journal of Integrative Agriculture*, 20(4), 1092–1106. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(20\)63436-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(20)63436-0)
- Sanni, M. A. (2024). Role of inclusive formal financing infrastructure for promoting women entrepreneurship in developing economies. In *Infrastructure Development Strategies for Empowerment and Inclusion* (pp. 300–323). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2917-7.ch014>
- Sugianor, Hidayatullah, & Fitri, M. S. (2019). *Perceraian Karena*

Tekanan Ekonomi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. 1–5.

Suyanto, B., & Hendrarso, E. S. (1996). *Wanita: Dari Subordinasi dan Marginalisasi menuju ke Pemberdayaan.* Airlangga University Press.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025). Badan Pusat Statistika. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjIwMCMY/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html>

Tunçsiper, Ç. (2025). Bridging the digital divide with gender equity in the digital world: empirical insights from OECD countries. *Journal of Work-Applied Management.* <https://doi.org/10.1108/JWAM-08-2024-0119>

Vuspit. (2022). *Hambatan Kearifan Lokal Anyaman Bambu sebagai Potensi Ekonomi Kreatif Bagi Perempuan di Desa Suka Maju.* 10(2), 1237–1244.

Wardana, R. I., & Magriasti, L. (2024). Analisis Ekonomi Politik dan Gender: Studi Kasus Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 3(1), 40–46. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v3i1.1381>

Wójcik-Czerniawska, A. J., & Grzymała, Z. (2025). Empowering Women through Entrepreneurship. In *Sustainable Entrepreneurship and Family Business for Women's Empowerment* (pp. 69–87). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8694-1.ch004>

Yigit, S. (2024). Empowered women and political leadership. In *Global Insights on Women Empowerment and Leadership* (pp. 62–81). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-2806-4.ch004>


Özyol, A. (2020). Investing in women's entrepreneurship: Inclusive and sustainable economic growth. In *Accounting, Finance, Sustainability, Governance and Fraud* (pp. 225–248). https://doi.org/10.1007/978-981-32-9588-9_1

PROFIL PENULIS



Risa Lailatul Majidah, S.E.I.

Ketertarikan saya terhadap bidang ekonomi dan manajemen tumbuh sejak masa sekolah, dan terus berkembang seiring waktu. Ketertarikan tersebut akhirnya membawa saya untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya, dengan memilih jurusan Ekonomi Islam. Menulis adalah langkah awal saya untuk menuangkan ide, pemikiran, dan pandangan saya tentang berbagai isu di bidang ekonomi. Saat ini, saya masih berada di tahap awal dalam dunia kepenulisan dan terus belajar untuk berkembang. Saya juga ingin membangun koneksi dengan sesama penulis, akademisi, dan praktisi agar dapat memperluas wawasan dan memperkaya karya-karya saya di masa depan. Melalui tulisan-tulisan yang saya buat, saya berharap bisa memberikan kontribusi positif, sekaligus menjadi bagian dari upaya menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi dan manajemen. Untuk terkoneksi dan berdiskusi bisa melalui risamajidah0@gmail.com.



BAB 15

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Jajuli, S.E., M.E.
Universitas Primagraha



Memahami Konsep dan Ruang Lingkup Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial, secara esensial, adalah sistem kebijakan publik yang didesain untuk membantu individu, keluarga, dan komunitas dalam mengelola risiko dan guncangan sosial ekonomi sepanjang siklus hidup mereka, sekaligus memastikan akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan sosial esensial (ILO, 2017). Ruang lingkungnya mencakup berbagai intervensi yang saling melengkapi, yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa pilar utama:

1. Bantuan Sosial (*Social Assistance*)

Bantuan sosial merupakan pilar perlindungan sosial yang ditujukan untuk kelompok masyarakat paling rentan dan miskin. Program-program ini menyediakan transfer sumber daya, baik dalam bentuk tunai maupun barang, secara non-kontributif. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi dampak kemiskinan ekstrem, dan mencegah rumah tangga dari kerentanan lebih lanjut. Di Indonesia, contoh nyata dari pilar ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga sangat miskin, dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako yang memfasilitasi akses pangan melalui kartu elektronik (Kementerian Sosial RI, 2024a; Kementerian Sosial RI, 2024b). Program ini seringkali menjadi garis pertahanan pertama bagi mereka yang paling membutuhkan.

2. Asuransi Sosial (*Social Insurance*)

Asuransi sosial adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip kontribusi wajib. Peserta dan/atau pemberi kerja secara berkala menyisihkan sebagian pendapatan mereka sebagai iuran untuk mendapatkan perlindungan terhadap risiko-risiko tertentu, seperti sakit, kecelakaan kerja, pensiun hari tua, dan kematian. Ketika risiko tersebut terjadi, peserta atau ahli warisnya berhak menerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan adalah institusi utama yang mengelola berbagai program asuransi sosial ini, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bersifat universal, serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan

Terakhir, tantangan geografis dan demografis di Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar dan tersebar, menciptakan kendala logistik dan administratif dalam penyaluran bantuan dan penyediaan layanan, terutama di daerah-daerah terpencil dan perbatasan yang sulit dijangkau.

Arah Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial di Masa Depan

Pengembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia di masa depan harus diarahkan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif, inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, yang mampu merespons dinamika sosial ekonomi dan tantangan global yang terus berkembang.

Menuju Perlindungan Sosial Universal dan Komprehensif harus menjadi tujuan utama jangka panjang. Ini berarti memperluas cakupan program-program jaminan sosial, seperti JKN dan jaminan ketenagakerjaan, hingga menjangkau seluruh penduduk Indonesia, termasuk kelompok pekerja informal dan rentan yang belum terlindungi (ILO, 2017). Universalitas juga berarti memastikan bahwa perlindungan yang diberikan mencakup berbagai risiko utama sepanjang siklus hidup, dari lahir hingga usia tua.

Penguatan Integrasi dan Koordinasi Lintas Sektor adalah prasyarat penting untuk efisiensi dan efektivitas. Pembangunan satu sistem data terpadu yang kuat, yang mampu memfasilitasi pertukaran informasi antar kementerian dan lembaga terkait secara aman dan *real-time*, akan meminimalkan tumpang tindih program dan meningkatkan ketepatan sasaran. Mekanisme koordinasi yang jelas dan forum komunikasi rutin antar pemangku kepentingan harus dilembagakan untuk memastikan sinergi kebijakan (World Bank, 2021).

Peningkatan Kualitas dan Relevansi Program perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala dan penyesuaian program berdasarkan bukti dan umpan balik dari lapangan. Program-program harus dirancang agar lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik berbagai kelompok masyarakat dan konteks lokal yang

berbeda. Inovasi dalam desain program, penyaluran bantuan, dan pemanfaatan teknologi harus dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi penerima manfaat (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Pengembangan Skema Perlindungan Sosial Adaptif (*Adaptive Social Protection* - ASP) menjadi sangat penting di tengah meningkatnya frekuensi dan intensitas guncangan eksternal seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan pandemi. ASP melibatkan kemampuan sistem perlindungan sosial untuk menyesuaikan diri dengan cepat dan efektif terhadap guncangan ini, baik dalam hal perluasan cakupan, peningkatan manfaat, maupun penggunaan mekanisme penyaluran darurat (Gentilini et al., 2020). Hal ini memerlukan fleksibilitas dalam anggaran dan kerangka regulasi.

Peningkatan Investasi Berkelanjutan dalam perlindungan sosial sangat krusial. Pemerintah perlu terus meningkatkan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program perlindungan sosial, memandang ini sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia dan stabilitas sosial. Selain itu, pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien akan memastikan bahwa setiap rupiah memberikan dampak maksimal (OECD, 2015).

Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi harus menjadi fokus integral dari program perlindungan sosial. Selain memberikan bantuan langsung, program harus dirancang untuk membantu penerima manfaat keluar dari ketergantungan dan mencapai kemandirian ekonomi dalam jangka panjang. Ini dapat dilakukan melalui integrasi dengan program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses ke permodalan, dan fasilitasi akses ke pasar kerja yang layak (ILO, 2023).

Pemanfaatan Teknologi Digital secara maksimal akan menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sistem perlindungan sosial. Teknologi dapat digunakan untuk pendaftaran dan identifikasi penerima manfaat yang lebih akurat, penyaluran bantuan secara non-tunai yang lebih aman, pemantauan program secara *real-time*, hingga analisis data untuk perbaikan kebijakan (Gelb & Pal, 2019).

Kesimpulan

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan pilar fundamental dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pencapaian keadilan di Indonesia. Dengan landasan konstitusional yang kuat dan berbagai program yang terus berevolusi, sistem ini berupaya untuk memberikan jaring pengaman bagi masyarakat dari berbagai risiko ekonomi dan sosial, sekaligus memastikan akses terhadap kebutuhan dasar dan pelayanan esensial. Meskipun demikian, perjalanan menuju sistem yang sepenuhnya inklusif dan efektif masih diwarnai oleh berbagai tantangan, mulai dari perluasan cakupan yang belum merata, isu ketepatan sasaran, disparitas kualitas layanan, hingga kebutuhan akan koordinasi yang lebih erat antar pemangku kepentingan.

Masa depan perlindungan sosial di Indonesia harus diarahkan pada pembangunan sistem yang universal, komprehensif, dan adaptif. Hal ini menuntut investasi yang berkelanjutan, penguatan integrasi dan koordinasi antar program, peningkatan kualitas layanan, serta pemanfaatan teknologi digital secara strategis untuk efisiensi dan transparansi. Lebih dari sekadar bantuan, perlindungan sosial harus juga berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi penuh dalam pembangunan. Dengan komitmen yang teguh dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia dapat mewujudkan visi perlindungan sosial yang memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, membangun masyarakat yang lebih berdaya tahan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- BPJS Kesehatan. (2024). *Laporan Tahunan BPJS Kesehatan Tahun 2023*. BPJS Kesehatan.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). *Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023*. BPJS Ketenagakerjaan.
- Gelb, A., & Pal, N. (2019). *Digital Identity for Development: Prospects and Challenges*. Center for Global Development.
- Gentilini, U., Almenfi, M. G., Blom, R., & Cognac, P. (2020). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Responses*. World Bank.
- ILO. (2017). *World Social Protection Report 2017-19: Universal social protection for sustainable development*. International Labour Organization.
- ILO. (2023). *Social Protection for Gig Workers in Indonesia: A Feasibility Study*. International Labour Organization Office for Indonesia and Timor-Leste.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI & Kementerian Agama RI. (2024). *Informasi Program Indonesia Pintar*. Diakses dari <https://pipmadrasah.kemenag.go.id/>.
- Kementerian Sosial RI. (2024a). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2024b). *Pedoman Umum Program Sembako*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Kementerian Sosial RI. (2024c). *Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST) 2020-2021*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.

- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. (2024). *Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Tahun 2023*. Diakses dari <https://www.prakerja.go.id/>.
- OECD. (2015). *Social protection in Indonesia: Strengthening the system*. OECD Development Policy Papers, No. 2. OECD Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2004a). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.
- The SMERU Research Institute. (2018). *Studi Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)*. The SMERU Research Institute.
- UNDP. (2019). *Social Protection in Indonesia: Current Landscape and Policy Options*. United Nations Development Programme.
- World Bank. (2017). *The State of Social Safety Nets 2017*. World Bank.
- World Bank. (2021). *Strengthening Social Protection in Indonesia: Challenges and Opportunities*. World Bank.


PROFIL PENULIS



Jajuli, S.E., M.E.

Penulis lahir pada tanggal 11 Juli 1995 di Serang. Sebagai dosen di Universitas Primagraha jurusan manajemen. Penulis menempuh jenjang Pendidikan SDN Kalilantang 2 (2002-2008) Desa Pakuncen Kecamatan Bojonegara Kabupaten, MTs Aljaharatunnaqiyah Tanjung (2008-2011), SMAN1 Bojonegara (2011-2014) Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Islam Negeri mengambil jurusan Asuransi Syariah/S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2014-2018) Kota Serang, kemudian pada tahun (2019-2021), penulis melanjutkan dan menyelesaikan studi S2 di prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi intra kampus sebagai Ketua HMJ Asuransi Syariah (2015-2016) maupun ekstra kampus PMII, IKMBP bahkan menjadi duta Pemuda bahari Provinsi Banten tingkat Nasional pada tahun 2018.

Penulis dapat dihubungi melalui Email: jajulijuli95@gmail.com



BAB 16
KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN DALAM
KONTEKS EKONOMI
KERAKYATAN

Umunisa Hidayati, M.InterDevPractice.
Universitas Riau



meningkat seiring dengan pertumbuhan tersebut. Oxfam Indonesia (2017) merilis sebuah laporan yang menunjukkan bahwa kesenjangan antara kelompok masyarakat terkaya dan sisanya di Indonesia tumbuh dengan laju yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Ini merupakan indikator nyata bahwa hasil dari pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, terutama kepada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat miskin pedesaan, dan komunitas adat. Ketimpangan yang terus melebar ini secara langsung melemahkan efektivitas strategi pengentasan kemiskinan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berbasis pada kekuatan lokal yakni pendekatan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menawarkan paradigma pembangunan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama ekonomi, bukan sekadar objek. Pendekatan ini mengedepankan penguatan sektor-sektor ekonomi rakyat seperti UMKM, pertanian, kelautan, koperasi, serta inovasi berbasis komunitas seperti *social enterprises*. Negara harus hadir secara aktif melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, memperkuat program perlindungan sosial, serta mendorong kolaborasi antara aktor negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

Bab ini akan membahas tentang potret kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, menelusuri bagaimana pendekatan ekonomi kerakyatan dapat menjadi alternatif strategis, serta mengeksplorasi strategi konkret dalam pengentasan kemiskinan yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Potret Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

Berdasarkan laporan terbaru dari *World Bank* (2024), Indonesia menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan yang relatif konsisten sejak awal dekade 2000-an. Data tahun 2023 dan 2024 semakin menguatkan kecenderungan ini, di mana tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,0% pada Maret 2024, turun sebesar 0,4 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Di wilayah perkotaan,

(Marta et al., 2024). Perguruan tinggi harus lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat yang berbasis riset dan teknologi tepat guna. Sektor swasta, melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dapat mendorong pembentukan rantai pasok yang lebih inklusif dengan melibatkan UMKM dan pelaku ekonomi lokal sebagai mitra usaha. Sementara itu, peran media dan komunitas sipil penting dalam mengawasi implementasi program serta memperluas literasi masyarakat. Namun, meskipun model pendekatan ini menawarkan kerangka kolaborasi yang komprehensif, ada beberapa faktor yang menyebabkan dampak nyata terhadap pembangunan desa menjadi terbatas, khususnya di daerah yang sangat tertinggal (*underdeveloped*) seperti keterbatasan sumber daya dan kapasitas, akses terhadap teknologi, serta dinamika sosial dan budaya yang kompleks. Oleh karena itu, penanganan yang lebih terfokus pada peningkatan kapasitas lokal, penguatan koordinasi, dan penyesuaian program dengan konteks sosial-budaya setempat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini.

Strategi keempat adalah digitalisasi dan perluasan akses keuangan inklusif. Transformasi digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas pasar, mengelola usaha secara efisien, dan meningkatkan daya saing (Sholihin, 2024). Namun, untuk memanfaatkan peluang ini, pelaku usaha kecil harus dilengkapi dengan literasi digital dan keuangan yang memadai. Pemerintah dan swasta perlu mengembangkan ekosistem pembiayaan mikro berbasis komunitas seperti koperasi digital dan *fintech* lokal yang ramah terhadap usaha kecil. Selain itu, *e-commerce* lokal perlu diperkuat sebagai kanal distribusi produk-produk rakyat dengan skema harga dan logistik yang adil.

Terakhir, strategi yang tak kalah penting adalah investasi dalam pendidikan kewirausahaan dan inovasi sosial. Kurikulum kewirausahaan sejak pendidikan menengah hingga perguruan tinggi perlu dikembangkan untuk menanamkan semangat kemandirian dan kreativitas ekonomi sejak dini (Haq et al., 2021). Inkubator bisnis desa, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan terhadap *social enterprise* harus menjadi bagian dari strategi nasional pemberdayaan ekonomi. Pengentasan kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai

pengurangan angka, tetapi sebagai proses transformasi sosial menuju masyarakat yang berdaulat secara ekonomi, bermartabat secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis.

Penutup

Pembahasan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam kerangka ekonomi kerakyatan menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan ekonomi konvensional yang bertumpu pada pertumbuhan semata. Realitas sosial-ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat, distribusi hasil pembangunan masih belum merata dan cenderung memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan hadir sebagai tawaran strategis: sebuah pendekatan yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan, mengedepankan kedaulatan ekonomi lokal, serta memperkuat kelembagaan kolektif seperti UMKM dan koperasi. Melalui mekanisme yang berbasis partisipasi dan solidaritas sosial, ekonomi kerakyatan mampu menjawab persoalan struktural kemiskinan dengan cara yang lebih inklusif dan berkeadilan. Namun demikian, implementasi ekonomi kerakyatan memerlukan dukungan lintas sektor dan sinergi kebijakan yang konsisten, mulai dari reformasi kebijakan fiskal, perlindungan sosial yang menyeluruh, hingga penguatan pendidikan kewirausahaan dan digitalisasi ekonomi rakyat. Jadi, strategi pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan bukan hanya wacana alternatif, melainkan fondasi penting dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bappenas. (2019). *Rancangan Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024*. Bappenas.
- Callen, T. (2024). *Gross domestic product: An economy's all*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/Series/Back-to-Basics/gross-domestic-product-GDP>.
- Fitrawaty, F. (2020). The analysis of inequality on economic growth in Indonesia. *Randwick International of Social Science Journal*, 1(3), 499–512. <https://doi.org/10.47175/rissj.v1i3.103>.
- Hanoman, J. (2017). The hidden faces of poverty. In *Hunger and Poverty in South Africa* (pp. 7–18). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315406060-2>
- Haq, S., Jalinus, N., Giatman, M., & Ganefri, G. (2021). Kewirausahaan pada kurikulum pendidikan Kejuruan. *CIVED*, 8(2), 85. <https://doi.org/10.24036/cived.v8i2.112268>
- Hasan, Z., & Yunus, M. (2022). Pendampingan UMKM maju digital melalui digital marketing bagi UMKM desa kemuningsari lor, Kecamatan Panti, jember. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 1(2), 60–65. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v1i2.12>
- Huda, N., & Sa'roni, C. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013-2021. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(1), 243–253. <https://doi.org/10.20527/jiep.v7i1.72>
- Javier, F. (2023). DATATEMPO. <https://data.tempo.co/data/1614/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2022-kembali-normal>.
- Kader, M. A. (2018). PERAN UKM DAN KOPERASI DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/jurisma.v8i1.995>.

- Kemensos RI. (2025, March 24). *Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia. <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>.
- Kementerian UKM RI. (2024). *Kementerian UMKM*. <https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>.
- Kencana, M. R. B. (2019, August 16). Entaskan Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Rp 157,1 triliun. *Liputan6*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4039766/entaskan-kemiskinan-pemerintah-siapkan-rp-1571-triliun>.
- Kruijssen, F., Tedesco, I., Ward, A., Pincus, L., Love, D., & Thorne-Lyman, A. L. (2020). Loss and waste in fish value chains: A review of the evidence from low and middle-income countries. *Global Food Security*, 26, 100434. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100434>.
- Kurniyanto, I. R., Arifiyanti, N., & Destiarni, R. P. (2023). Strategi pengentasan kemiskinan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Desa Keleyan. *AGRISCIENCE*, 3(3), 699–709. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v3i3.19448>.
- Liu, Q., Guo, Z., Gao, L., Dong, Y., Moallemi, E. A., Eker, S., Yang, J., Li, X., Obersteiner, M., & Bryan, B. A. (2021). *A review of model-based scenario analysis of poverty for informing sustainability*. California Digital Library (CDL). <https://doi.org/10.31223/x53k9m>.
- Lubis, H. (2017). Mengentaskan kemiskinan: Multidimensional approach. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901>.
- Marta, A., Febrina, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Ms, Z. Harirah. (2024). The quintuple helix innovation model: A pathway to sustainable development in marginalized rural communities. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(3), 647–665. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.15688>.
- Nolan, B. (2024). Intergenerational persistence of poverty. In *Research*

- Handbook on Intergenerational Inequality* (pp. 73–85). Edward Elgar Publishing.
<https://doi.org/10.4337/9781800888265.00013>.
- OCBC. (2021). *Sistem ekonomi kerakyatan: Pengertian, Ciri, & Contohnya*.
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/09/06/sistem-ekonomi-kerakyatan>.
- OXFAM Indonesia. (2022, May 25). *Towards a more equal Indonesia*. Oxfam International.
<https://www.oxfam.org/en/research/towards-more-equal-indonesia>.
- Putri, E. P., Pardi, S., & Lokajay, I. N. (2016). STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN DI JAWA TIMUR MELALUI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Heuristic*, 12(02). <https://doi.org/10.30996/he.v12i02.632>.
- Sari, S. N. I. (2021). PENGARUH PEMBERDAYAAN, LAMA MENGELOLA DAN PENDAPATAN TERHADAP KINERJA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 45–57. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.160>.
- Sebo, A. J. N., & Sukadana, I. W. (2022). PENGARUH UPAH DAN INVESTASI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BALI. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 11(9), 3523. <https://doi.org/10.24843/eep.2022.v11.i09.p08>.
- Sholihin, Ustadus. (2024). Meningkatkan daya saing pasar UMKM Melalui Transformasi Digital. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-commerce*, 3(2), 100–114. <https://doi.org/10.30640/digital.v3i2.2512>.
- Syahrul Fauzi, A., Runtiningsih, S., & Hidayat, F. (2022). Determinants of Poverty in Indonesia and its Policy Implications, Multidimensional Approach to Measuring Poverty. *JOVISHE* :

Journal of Visionary Sharia Economy, 1(1), 12–24.
<https://doi.org/10.57255/jovishe.v1i1.70>.

Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM Di INDONESIA: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan*. Prenada Media.

Utama, A. (2024, February 8). *Sebagai Penggagas Program AUTP, Mentan: Petani Harus Tahu Manfaat dan Cara Daftarnya*. PSP Pertanian. <https://psp.pertanian.go.id/berita/sebagai-penggagas-program-autp-mentan-petani-harus-tahu-manfaat-dan-cara-daftarnya>.

World Bank. (2024). *Indonesia poverty and equity brief: October 2024*. World Bank. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099124001062512710>.

Yulya Ammi Hapsari, Putri Apriyanti, Aldi Hermiyanto, & Fahrur Rozi. (2024). Analisa Peran UMKM Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(4), 53–62. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i4.464>.


PROFIL PENULIS



Ummunnisa Hidayati, M.InterDevPractice.

Ummunnisa memulai minat dan karirnya di bidang pembangunan sejak tahun 2011. Memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman, ia telah terlibat dalam berbagai aktivitas pembangunan, termasuk magang, kegiatan sukarelawan, dan pekerjaan profesional di sektor-sektor seperti kebencanaan, pengembangan masyarakat, layanan kesehatan primer, pengembangan pemuda, gender, dan pembangunan berkelanjutan. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Riau. Pendidikan formalnya adalah *Master of International Development* dari Monash University Australia yang ditempuh dengan beasiswa dari Australia Awards Scholarships pada tahun 2018. Selama studinya, ia aktif berpartisipasi dalam berbagai program pelatihan dan konferensi, termasuk konferensi *Australian Council for International Development* di Sydney pada tahun 2018 dan program pertukaran pemuda untuk mempelajari pendidikan dan teknologi kebencanaan di Jepang pada tahun 2012.

Email: umunnisahidayati@lecturer.unri.ac.id & umunsy@gmail.com



BAB 17
GENERASI MUDA DAN
REGENERASI EKONOMI
KERAKYATAN

Erni Junaida, S.E., M.S.M.
Universitas Samudra



Pengertian Generasi Muda

Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang berada dalam usia remaja hingga dewasa awal, memiliki energi dan potensi untuk membangun peradaban masa depan (Suryono, Y, 2019). Generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang berada dalam rentang usia remaja hingga dewasa awal, biasanya antara usia 15 hingga 30 tahun. Mereka berada dalam fase perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan sosial yang pesat. Generasi ini dikenal sebagai kelompok yang memiliki semangat tinggi, idealisme kuat, daya kritis tajam, dan keterbukaan terhadap perubahan serta teknologi baru. Mereka juga memiliki peran strategis sebagai pewaris dan penerus estafet pembangunan bangsa. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, generasi muda menghadapi tantangan besar, namun juga memiliki peluang yang luas untuk berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan.

Generasi muda memiliki posisi strategis dalam pembangunan bangsa, namun, potensi tersebut harus terus dibina melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan kesempatan berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Negara dan masyarakat perlu menciptakan ruang partisipatif agar generasi muda tumbuh menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas.

Peran Strategis Generasi Muda

1. Sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mendorong kemajuan bangsa di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik.
2. Penerus dan penjaga nilai-nilai bangsa yang harus memahami sejarah dan identitas nasional.
3. Pelaku pembangunan nasional, baik melalui pendidikan, wirausaha, maupun teknologi.
4. Pembangun karakter bangsa, karena mereka menentukan wajah Indonesia di masa depan.

Peran Strategis Generasi Muda Indonesia memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Mereka merupakan kelompok usia produktif yang adaptif terhadap perubahan, kreatif, dan memiliki akses luas terhadap teknologi dan

5. Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah
 - a. Program bantuan tidak jarang menimbulkan ketergantungan dan tidak mendorong kemandirian usaha rakyat.
 - b. Kurangnya strategi pemberdayaan jangka panjang.
6. Pasar yang Tidak Stabil
 - a. Produk ekonomi kerakyatan sering tidak memiliki akses ke pasar yang luas atau stabil.
 - b. Ketergantungan pada tengkulak dan rantai distribusi yang tidak adil.
7. Kurangnya Dukungan Kebijakan yang Konsisten
 - a. Kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat sering tidak berkelanjutan akibat pergantian kepemimpinan.
 - b. Program-program pemerintah tidak terkoordinasi antara pusat dan daerah.

Solusi Kunci Permasalahan Ekonomi Kerakyatan

1. Meningkatkan Minat Generasi Muda
 - a. Inklusi kewirausahaan lokal di pendidikan: Integrasi pelajaran kewirausahaan berbasis lokal di sekolah dan universitas.
 - b. Pendampingan bisnis milenial: Program inkubasi usaha bagi pemuda di bidang pertanian, kerajinan, atau UMKM digital.
 - c. *Storytelling* inspiratif: Promosi tokoh muda sukses dari sektor ekonomi rakyat untuk mengubah persepsi.
2. Mempermudah Akses Modal dan Teknologi
 - a. Digitalisasi koperasi dan UMKM: Mendorong penggunaan aplikasi keuangan, pemasaran digital, dan *e-commerce*.
 - b. Skema pembiayaan mikro inklusif: Kredit usaha rakyat (KUR) berbunga rendah dengan syarat mudah dan pendampingan.
 - c. Kemitraan dengan *startup fintech*: Untuk membantu sistem pencatatan keuangan dan pemasaran digital.
3. Peningkatan Kualitas SDM
 - a. Pelatihan teknis dan manajerial: Secara rutin dan berbasis praktik langsung di komunitas.
 - b. Mentoring antar generasi: Kolaborasi antara pelaku usaha senior dan muda untuk transfer pengetahuan.

4. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Rakyat
 - a. Revitalisasi koperasi: Modernisasi manajemen koperasi agar lebih profesional dan transparan.
 - b. Legalitas usaha yang mudah dan murah: Agar pelaku ekonomi rakyat masuk dalam ekosistem formal.
5. Pengembangan Akses Pasar
 - a. Platform pasar digital lokal: *E-commerce* berbasis desa/kecamatan untuk jual produk lokal langsung ke konsumen.
 - b. Kemitraan dengan industri besar: Agar produk ekonomi kerakyatan bisa masuk rantai pasok yang lebih luas.
6. Kebijakan Publik yang Konsisten dan Pro-Rakyat
 - a. Rencana jangka panjang lintas pemerintahan: Program ekonomi kerakyatan harus dilanjutkan meskipun ganti kepala daerah/pemerintah.
 - b. Insentif pajak dan subsidi produktif: Untuk usaha mikro dan kecil yang berdampak sosial.
7. Pola Pemberdayaan Berbasis Komunitas
 - a. *Bottom-up approach*: Libatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
 - b. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, kampus, dan sektor swasta: Sinergi untuk dampak lebih luas dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Budimanta, A. (2008). *Perekonomian Indonesia dalam perspektif ekonomi kerakyatan*. Jakarta: LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Etika sosial: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto. (1997). *Ekonomi kerakyatan: Teori dan kebijakan*. Jakarta: LP3ES.
- Salim, E. (2005). *Pembangunan berkelanjutan: Peran ekonomi rakyat*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Ekonomi kerakyatan: Membangun ekonomi rakyat sebagai arus utama*. Yogyakarta: UII Press.
- Suyatno. (2011). *Pendidikan Nilai dan Karakter dalam Perspektif Sosial*, Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Swasono, S.-E. (2006). *Ekonomi kerakyatan: Agenda reformasi ekonomi Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Yunus, M. (2006). *Bank kaum miskin: Mikrokredit menanggulangi kemiskinan di dunia* (E. Santosa, Trans.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Original work published 1999)

PROFIL PENULIS



Erni Junaida, S.E., M.S.M.

Penulis lahir di Aceh Timur pada tanggal 23 Juni 1968. Penulis tertarik terhadap ilmu Ekonomi khususnya bidang Manajemen yang dimulai pada tahun 1991 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Samudra dengan memilih Jurusan Ekonomi Manajemen dan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Pada tahun 2010 Penulis kemudian melanjutkan studi S2 pada program Pasca Sarjana Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh Utara. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 dan meraih gelar M.S.M (Magister Sain Manajemen) dengan predikat cumlaude.

Penulis aktif mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Samudra, Langsa, Aceh sejak tahun 2008 dengan status kampus Universitas Samudra yang masih berstatus swasta hingga sekarang ini dengan status kampus Universitas Samudra sudah menjadi Perguruan Tinggi Negeri. Penulis mengampu beberapa mata kuliah diantaranya Pengantar Manajemen, Pengantar Bisnis, Hukum Bisnis, Etika Bisnis, Manajemen Pemasaran, Pemasaran Strategik, Penulisan Karya Ilmiah, Seminar Manajemen, Proyek Kewirausahaan, dan Perilaku Konsumen pada Program Studi Manajemen, Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi.

Email Penulis: ernijunaida@unsam.ac.id

EKONOMI KERAKYATAN

Pilar Keadilan dan Kemandirian Bangsa

Buku ini merupakan sumbangsih pemikiran yang mencoba mengelaborasi dan menegaskan kembali betapa vitalnya konsep ekonomi kerakyatan dalam membangun fondasi keadilan sosial dan kemandirian bangsa di Indonesia. Dalam dinamika perekonomian global yang kian kompleks, seringkali kita terjebak dalam arus liberalisasi dan kapitalisme yang cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat akar rumput. Di tengah tantangan tersebut, gagasan ekonomi kerakyatan muncul sebagai mercusuar harapan, menawarkan paradigma yang berpusat pada pemberdayaan rakyat, pemerataan aset, serta keadilan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan. Ini bukan sekadar wacana, melainkan sebuah jalan nyata menuju kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengurai benang kusut pemahaman tentang ekonomi kerakyatan, topik utama yang dibahas pada buku ini meliputi:

1. Filosofi Ekonomi Kerakyatan
2. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kerakyatan di Indonesia
3. Ekonomi Kerakyatan dalam Konstitusi
4. Perbandingan Ekonomi Kerakyatan dengan Kapitalisme dan Sosialisme
5. Koperasi sebagai Sokoguru Ekonomi Kerakyatan
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
7. Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan
8. Ekonomi Kreatif dan Potensi Lokal
9. Akses Permodalan dan Keuangan Inklusif
10. Pajak Progresif dan Keadilan Distribusi
11. Ekonomi Hijau dan Energi Terbarukan
12. Pengembangan Ekonomi Berbasis Pesantren
13. Pemasaran Produk Lokal dalam Gerakan Slow Food
14. Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi Kerakyatan
15. Perlindungan dan Jaminan Sosial
16. Kemiskinan dan Ketimpangan dalam Konteks Ekonomi Kerakyatan
17. Generasi Muda dan Regenerasi Ekonomi Kerakyatan